

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
PADA PEMDA KAB. MAROS MENGACU PADA
PP NOMOR 24 TAHUN 2005**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD SATRIO
45 01 013 014

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2006**



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemda Kab. Maros Mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005.

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD SATRIO

STAMBUK : 45 01 013 014

JURUSAN : AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I



Drs. Syamsuddin, M.Si., Ak.

PEMBIMBING II



Faridah, SE., AK.

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45" Makassar

Ketua Jurusan Akuntansi


Haeruddin Saleh, SE., M.Si.
Faridah, SE., AK.

Tanggal Pengesahan :



HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Kamis / 30 November 2006
Skripsi Atas Nama : **MUHAMMAD SATRIO**
No. Stambuk : 45 01 013 014

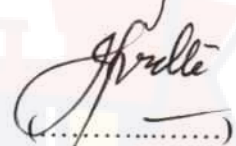
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

PANITIA UJIAN SKRIPSI

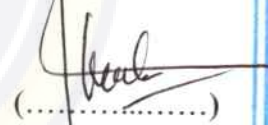
Pengawas Umum : **Prof. DR. H. ABU HAMID**
(Rektor Universitas "45" Makassar)



Ketua : **HAERUDDIN SALEH, SE., M.Si.**
(Dekan Fak. Ekonomi Univ. "45" Makassar)



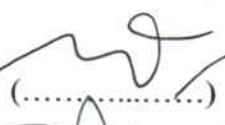
Sekretaris : **Herminawaty, SE., MM**



Anggota Penguji : 1. **Drs. Syamsuddin, M.Si., Ak.**



2. **Drs. Mardjuni, M.Si.**



3. **Faridah, SE., Ak.**



4. **Darmawati, SE., Ak.**



KATA PENGANTAR

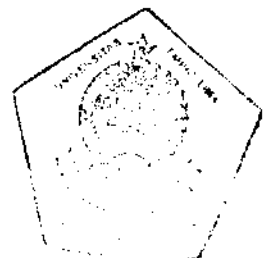
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Yang Maha Segalanya diatas makhlukNya, yang atas Kuasa dan Kasih SayangNya sehingga karya tulis ini selesai disusun. Salam dan Taslim tak lupa Penulis panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Imam dan Pemimpin kita dalam berislam. Amin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar. Sekaligus menjadi wadah bagi Penulis untuk mengapresiasi potensi yang didapatkan selama bermahasiswa terkhusus dalam bingkai disiplin ilmu yang Penulis tekuni.

Pada ruang inipula, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada segenap pihak, yang tidak bisa Penulis tulis satu persatu, yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu bantuan yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, baik itu yang dilakukan dengan ikhlas ataupun karena terpaksa. Penulis kembalikan segalanya ke kehadirat Ilahi yang Maha Bijak lagi Maha Mengetahui

Akhirnya harapan Penulis, semoga karya tulis ini dapat memberi manfaat bagi segenap unsur yang mempunyai kepentingan atasnya meskipun tak dapat Penulis pungkiri, karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan Penulis



sendiri dan keterbatasan referensi. Oleh karenanya, Penulis senantiasa membuka pintu kritikan konstruktif guna pengembangan yang lebih sempurna kedepannya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tinjauan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori.....	5
2.1.1. PP Nomor 24 Tahun 2005.....	5
2.1.2. Pengertian Aset Tetap.....	6
2.1.3. Klasifikasi Aset Tetap.....	8
2.1.4. Pengakuan dan Penilaian Aset Tetap Menurut PP Nomor 24 tahun 2005	9
2.1.5. Perolehan Aset Tetap Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005.....	11
2.1.5.1. Pertukaran Aset (Exchange of Assets).....	11
2.1.5.2. Aset Donasi.....	12

2.1.6. Pencatatan Aset Tetap Menurut PP Nomor 25	
Tahun 2005.....	13
2.1.6.1. Tanah	13
2.1.6.2. Peralatan dan Mesin	14
2.1.6.3. Gedung dan Bangunan	15
2.1.6.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16
2.1.6.5. Aset Tetap Lainnya	17
2.1.6.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	17
2.1.7. Penyusutan dan Penilaian Kembali Aset Tetap	
Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005.....	18
2.1.8. Perlakuan Terhadap Aset Tetap Bersejarah	
(Heritage Assets)	19
2.2. Kerangka Fikir	21
2.3. Hipotesis	22
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Daerah Penelitian	23
3.2. Metode Pengumpulan Data	23
3.3. Jenis dan Sumber Data	24
3.3.1. Jenis Data	24
3.3.2. Sumber Data	24
3.4. Metode Analisis	25
3.5. Defenisi Operasional	25

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Maros	27
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Maros	27
4.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Maros ...	31
4.1.3. Analisis Struktur Organisasi.....	33
4.2. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Maros.....	42
4.2.1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Sekda Pemda Kabupaten Maros	42
4.2.2. Prosedur Pengklasifikasian, Pengukuran dan Pencatatan Aset Tetap pada Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Maros	44
4.3. Pengklasifikasian, pengukuran dan Pencatatan Aset Tetap pada Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Maros Menurut PSAP No. 07.	88

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi manajemen keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan ditetapkan satu paket Undang-Undang bidang keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebelum paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut ditetapkan, pemerintah telah melakukan usaha-usaha pengembangan bidang keuangan daerah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dalam implementasinya mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain karena pertanggungjawaban atas pengelolaan daerah belum dilengkapi dengan ketentuan atau pedoman lebih lanjut.

Sehubungan dengan itu, Menteri Keuangan telah membentuk tim evaluasi dan percepatan pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 355/KMK.07/2001. Kelompok kerja evaluasi pembiayaan dan informasi keuangan daerah dari tim tersebut telah menghasilkan

suatu sistem akuntansi keuangan daerah, Sebagai prototipe sistem akuntansi pemerintah daerah. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri telah berupaya mengisi kekosongan peraturan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan ditetapkannya paket undang-undang dibidang Keuangan Negara, maka pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang memadai dan andal untuk melakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Sdan jutnya dalam tahun 2004 telah ditetapkan pula Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Iindang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

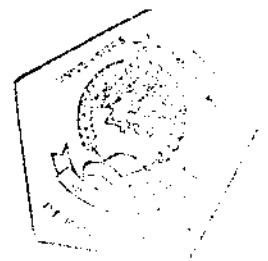
Di tahun 2005 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pcmerintahan (SAP) yang dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah baru dalam pelaporan keuangan di Indonesia. Peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan, yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP Nomor 24 tahun 2005 secara garis besar memuat tentang laporan keuangan daerah yang terkandung dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dan khusus mengenai perlakuan akuntansi aset tetap daerah yang diatur dalam PSAP Nomor 07 secara garis besarnya memuat tata cara Pengakuan, Pengukuran dan Penilaian aset tetap daerah dan diulas secara detail dan teknis dalam Buletin Teknis yang merupakan instrumen pendukung PP nomor 24 tahun 2005 untuk lebih memudahkan entitas pelaporan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut.

Pemda Kabupaten Maros, sebagai salah satu entitas pelaporan, sesuai amanat undang-undang harus pula membuat laporan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem dan prosedur serta perlakuan akuntansi yang mendahului proses penyajian laporan keuangan tersebut diharapkan sesuai pula dengan apa yang diatur dalam SAP. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah kabupaten Maros telah mengacu pada PP Nomor 24 tahun 2005, dalam menyajikan pertanggungjawaban publiknya dalam bingkai pelaporan keuangan yang transparan, Akuntabel dan andal.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka yang menjadi masalah adalah apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemda Kabupaten Maros telah mengacu pada PSAP No. 07.



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap Pemda Kabupaten Maros terhadap apa yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 2005.
2. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan pemerintah dalam mensosialisasikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini :

1. Memberikan masukan atau rekomendasi kepada Pemda Kabupaten Maros.
2. Sebagai referensi alternatif bagi pihak lain yang memiliki minat pada Akuntansi Sektor Publik.
3. Sebagai media bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang Akuntansi Sektor Publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 PP Nomor 24 Tahun 2005

PP Nomor 24 tahun 2005 lahir sebagai akibat dari kebutuhan akan tertib pembukuan yang dirasa semakin menjadi kebutuhan yang mutlak. Kebutuhan akan pelaporan keuangan yang lebih terbuka, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan seakan terkendala dengan tidak adanya satu bentuk acuan standar akuntansi.

Menurut Mardiasmo (2005) dalam sambutannya pada acara sosialisasi PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa :

"...Proses penyusunan SAP memakan waktu yang relatif panjang yang dimulai sejak tahun 2002 dengan terbitnya Kepmenkeu Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 yang menetapkan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAPD). Kedudukan Komite ini selanjutnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 dan namanya diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Produk yang dihasilkan KSAPD diterima dan disempurnakan oleh KSAP menjadi SAP yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. ...PP Nomor 24 Tahun 2005 ini terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KK) dan 11 (sebelas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)...."

Mahsun, M. Firma S, dan Heribertus A.P (2006 : 43-44) menguraikan 11 (sebelas) PSAP yang dikutip dari PP Nomor 24 Tahun 2005 sebagai berikut :

- a) PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- b) PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- c) PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
- d) PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- e) PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
- f) PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
- g) PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset tetap
- h) PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan
- i) PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban,
- j) PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.

- k) PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Didalam implementasinya PP Nomor 24 Tahun 2005, dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis untuk memudahkan penerapannya bagi entitas pelaporan. Di tingkat daerah, yang termasuk dalam entitas pelaporan menurut Ihyaul Ulum (2005 :106) adalah :

- a) Pemerintah Daerah secara Keseluruhan,
- b) DPRD, Pemerintah tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pemerintah tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga -fekonis Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi Pemerintah Daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam Struktur Pemerintah Daerah, Dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi Pemerintah Daerah.

2.1.2 Pengertian Aset Tetap

Pada dasarnya, aset tetap bagi suatu organisasi, baik organisasi sektor swasta ataupun sektor publik berfungsi sebagai instrumen atau fasilitas untuk mempermudah kerja-kerja organisasi atau dapat juga berfungsi sebagai investasi barang modal bagi suatu organisasi.

Aset, seperti yang dikemukakan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang dijabarkan dalam PSAP Nomor 07, adalah :

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi inasyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Hal yang sama dipaparkan oleh Abdul Halim (2004 : 79) bahwa aset adalah :

"sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang".

Pengertian aset tetap menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 yang dijabarkan dalam PSAP No. 07 adalah: "aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dimanfaatkan oleh masyarakat umum."

Indra Bastian dan Gatot Supriyanto (2003 : 69) mengemukakan defenisi aset tetap sebagai berikut Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun."

Soemarso S.R (1999 : 23) memaparkan defenisi aset tetap sebagai berikut : "Aset tetap adalah aset yang : (1) jangka waktu pemakaiannya lama; (2) digunakan dalam kegiatan perusahaan; (3) dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta; (4) nilainya cukup besar.

Sementara Firdaus A. Dunia (2005 : 151) mengemukakan aset tetap (*Plant Assets atau Fixed assets property plant and equipment*) adalah : aktiva yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material."

Abdul Halim (2004 : 78) mengemukakan definisi aset tetap adalah : "aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik."

Zaki Baridwan (2004 : 271) memaparkan pengertian aset tetap berwujud sebagai aset berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan

perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aset yang, bersangkutan dapat digtmakan dalam jangka waktu yang relatif lama.

2.1.3 Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang dijabarkan dalam PSAP Nomor 07, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut :

- a) Tanah, yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap pakai.
- b) Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa mantaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- d) Jalan, irigasi dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan kondisi siap pakai.
- e) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

- f) Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

2.1.4 Pengakuan dan Penilaian Aset Tetap Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 yang dijabarkan pada PSAP No. 07 bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu asset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b) Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan dan penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum,

misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan motor. Apabila perolehan aset belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Dalam hal pengukuran aset tetap, pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Suatu aset tetap dinilai berdasarkan pada biaya perolehannya. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan langsung adalah: (a) biaya persiapan tempat; (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*); (c) biaya pemasangan (*instullation cost*); (d) biaya

professional seperti arsitek dan insinyur ;dan (e) biaya konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun secara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Untuk aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan nilai ajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

2.1.5 Perolehan Aset Tetap Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005

2.1.5.1 Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh dengan cara pertukaran antar aset, bisa dalam bentuk yang serupa ataupun yang tidak serupa.

Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. biaya dari pos semacam ini diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas

nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

2.1.5.2 Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non Pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan

sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, suatu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2.1.6 Pencatatan Aset Tetap Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005

Pencatatan aset tetap menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, khususnya PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, dikemukakan secara general dan secara teknis dijabarkan dalam bentuk Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai berikut :

2.1.6.1 Tanah

Nilai tanah yang dicantumkan dalam neraca awal adalah nilai wajar pada tanggal neraca awal. Nilai wajar yang dimaksud adalah harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal. Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, maka nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen disekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independen dapat mewakili

harga pasar. Dalam penentuan nilai wajar, perlu dipertimbangkan antara manfaat dan biaya dalam rangka penentuan nilai wajar tersebut.

Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

Dalam catatan atas laporan keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan tanah yang tercantum dalam neraca awal serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah apabila ada.

Jurnal untuk mencatat saldo awal tanah adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	Tanah	xxx	
xxxx	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		xxx

2.1.6.2 Peralatan dan Mesin

Nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat

dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

Jumlah untuk mencatat saldo awal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	Peralatan dan Mesin	xxx	
xxxx	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		xxx

2.1.6.3 Gedung dan Bangunan

Nilai wajar Gedung dan Bangunan adalah harga perolehan jika gedung dan bangunan tersebut dibeli atau dibangun setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.

Jika gedung dan bangunan diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar Gedung dan Bangunan ditentukan dengan menggunakan NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP, maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau membentuk tim penilai yang kompeten.

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan Gedung dan Bangunan yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk akuisisi Gedung

dan Bangunan apabila ada.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	Gedung dan Bangunan	xxx	
xxxx	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		xxx

2.1.6.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai wajar Jalan, Irigasi, dan Jaringan ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis (yang antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi asset) dari instansi pemerintah yang berwenang yang diterbitkan setahun atau kurang dari tanggal Neraca.

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk akuisisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan apabila ada.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	
xxxx	Diinvestasikan dalam Aset tetap		Xxx

2.1.6.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan menggunakan nilai wajar jika asset tersebut dibeli pada tanggal neraca.

Dalam catatan atas laporan keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan Aset Tetap Lainnya yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap Lainnya apabila ada.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	Aset Tetap Lainnya	xxx	
xxxx	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		xxx

2.1.6.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Dokumen sumber untuk mencatat nilai konstruksi dalam pengerjaan adalah akumulasi seluruh nilai Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai

dengan tanggal neraca.

Konstruksi dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi asset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
xxxx	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		xxx

2.1.7 Penyusutan dan Penilaian Kembali Asset Tetap Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai

pengurang nilai tercatat Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain :

- a) Metode garis lurus (*straight line methode*)
- b) Metode saldo menurun (*double declining balance methode*)
- c) Metode Unit Produksi (*unit of production methode*)

Dalam hal penilaian kembali (*revaluation*) aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

2.1.8 Perlakuan terhadap Aset Tetap Bersejarah (*Heritage Assets*).

Di dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, khususnya PSAP Nomor 07, diatur bahwa SAP tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

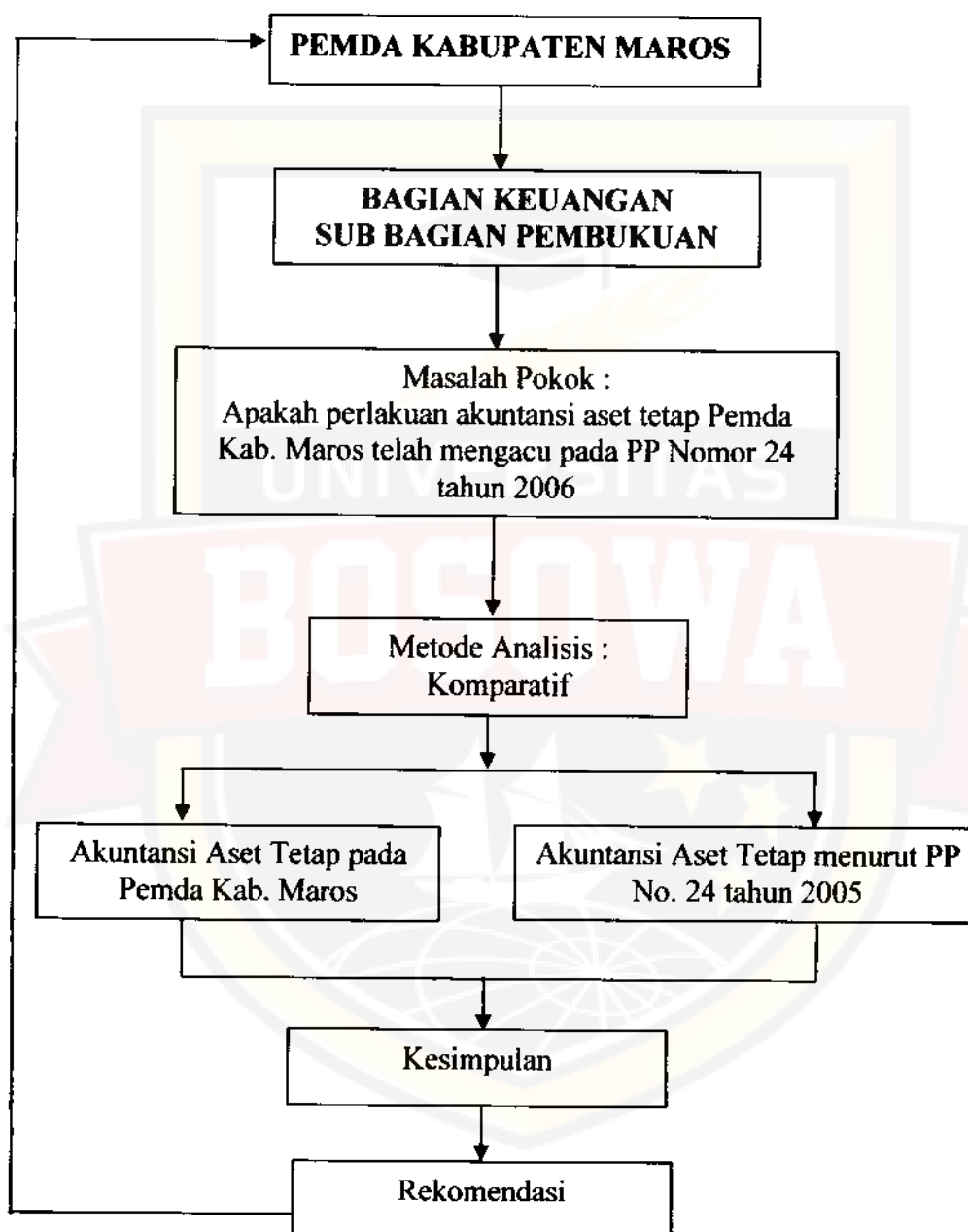
Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan sejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*work of art*). Karakteristik-karakteristik berikut sering dianggap ciri khas dari suatu aset bersejarah, yaitu :

- a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh diibandingkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan diganti meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang dimiliki selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahunan terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

2.2 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis adalah diduga bahwa Pemda Kabupaten Maros belum menerapkan sistem akuntansi aset tetap sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lebih riil dari permasalahan tersebut, penulis mengadakan penelitian pada Pemda Kabupaten Maros.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna memperoleh kerangka teori sekaligus sebagai alat dalam menganalisis data yang diperoleh.
2. Penelitian lapangan (*Field research*)
 - a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan plan mengadakan pengamatan secara langsung dalann proses kegiatan pengolahan data keuangan pada bagian keuangan.
 - b. Interview

Teknik interview yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan pegawai staf pembukuan pada bagian keuangan Pemda Kabupaten Maros.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Data kualitatif; yaitu data yang bukan berupa angka-angka.

Dalam penulisan ini data kualitatifnya berupa konsepsi sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

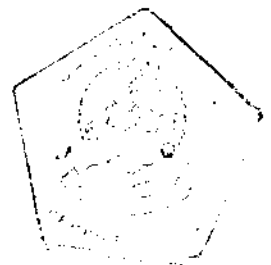
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka.

Dalam penulisan ini data kuantitatif berupa data-data yang berupa angka yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3.3.2 Sumber Data

Untuk mengakui kebenaran hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat berupa :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan pengamatan serta wawancara dengan staf pembukuan pada bagian keuangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen serta sumber-sumber lainnya berupa informasi terutama yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.



3.4 Metode Analisis

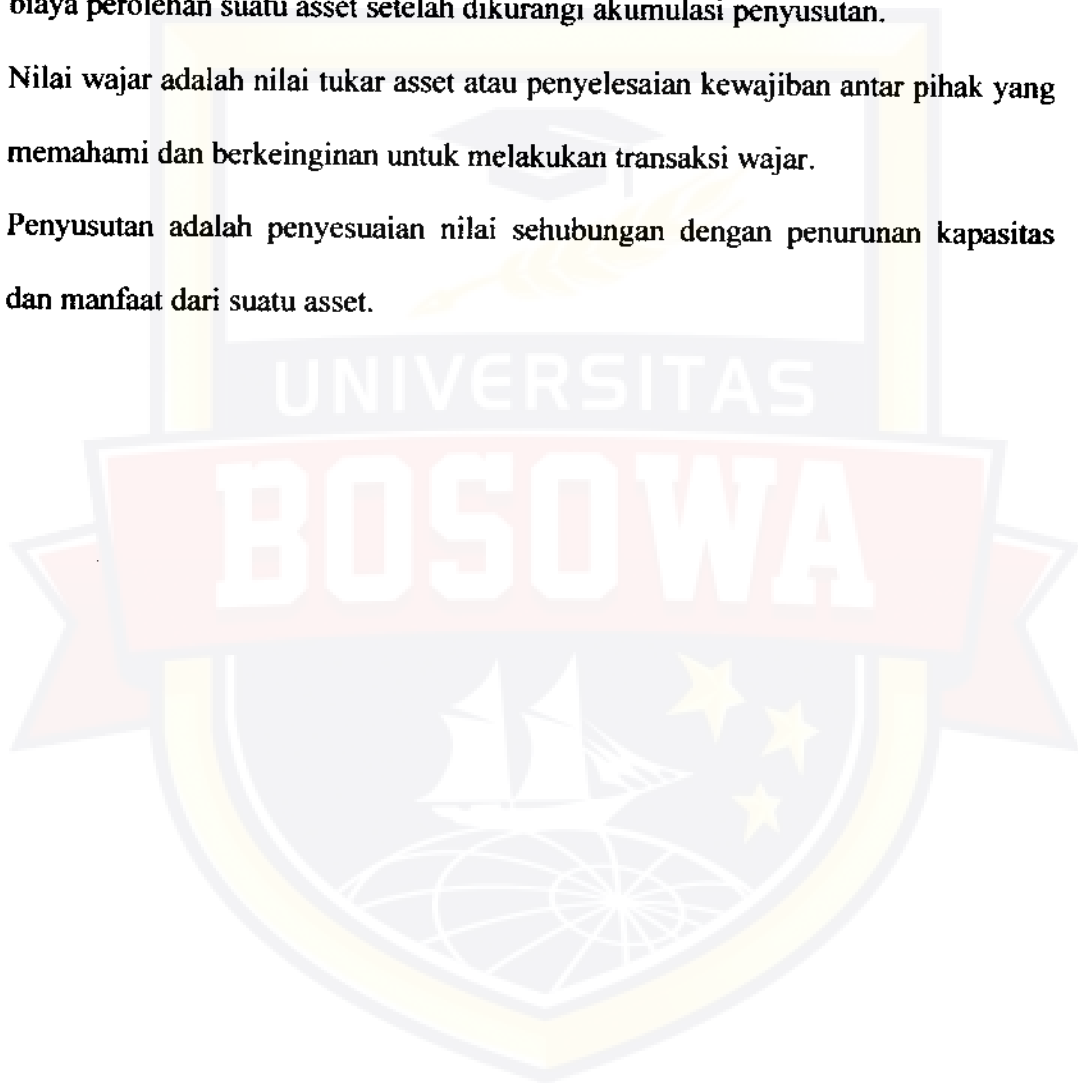
Untuk mengetahui sejauh mana perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemda Kabupaten Maros, maka penulis menggunakan metode komparasi dengan mengacu pada PP nomor 24 tahun 2005 terkhusus pada PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan Aset tetap
2. Mengakui, mengukur dan menilai aset tetap
3. Mencatatnya dalam jurnal umum

3.5 Defenisi Operasional

1. Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
3. Masa manfaat adalah :
 - a) Periode suatu asset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

4. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu asset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. Nilai tercatat (*Carrying amount*) asset adalah nilai buku asset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu asset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Maros

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Maros

Maros, sebuah daerah yang terbentang cukup luas mulai dari sebelah selatan kota Makassar dan melebar ke barat sampai ketepi Selat Makassar, dan seterusnya berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan, diantaranya adalah Kab. Bone, Gowa dan Kab. Pangkep serta beberapa kabupaten yang sempat menyerempet diantaranya Soppeng dan Takallor (tidak berbatasan langsung).

Pada dasarnya Maros sebelum menjadi daerah tingkat dua atau pemerintah kabupaten seperti sekarang ini, telah melalui perubahan dalam sejarahnya. Mulai pada saat masih sistem kerajaan sampai pada berdirinya kerajaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan menjadikan Maros sebagai salah satu daerah tingkat dua (kabupaten) sebagaimana daerah-daerah lainnya.

Kalau ditelisik darimana asal kata dan penamaan "**Marusu**" maka ada beberapa pendapat yang mengemukakannya, dalam masing-masing versi didasari oleh cerita yang berbeda-beda, sehingga penulis sulit menarik kesimpulan tentang versi atau pendapat mana yang paling tepat. Berdasarkan cerita-cerita peninggalan para leluhurnya serta kepingan catatan yang ada, dikemukakan beberapa cerita tentang asal kata "**marusu**" dalam beberapa versi yang berbeda yaitu:

- 1) "Marusu", dari kata A'MARU atau APPAMARU, yang artinya "DIMADU" atau "MEMADU" beberapa istri, mengapa muncul kata tersebut yang kemudian berubah menjadi "MARU" atau "MARSUSU", dapat diambil kesimpulan kemungkinan pada zaman dahulu seorang putri MARSUSU dimadu oleh raja dari daerah lain atau sebaliknya raja marusu yang gemar memadu banyak istri. Kalau kita buka lontara Bilang raja Gowa dan Tallo atukah Lontara Tallo maka akan didapati satu catatan yang menceritakan bahwa ketika yang menjadi raja Tallo adalah I Mangngayong Berang Karaeng pasi tuna parusu, salah seorang putri karaeng Loe Ri Marusu, Raja Marusu II yang bernama I Pasolemba dimadu oleh raja tersebut.
- 2) versi kedua ialah bahwa kata "MARSUSU" berasal dari kata bahasa Makassar "RUSUNG" dan atau bahasa bugis "MA'RUSUNG" yang mana maknanya dari kedua kata tersebut sama yaitu suatu keadaan yang sederhana baik individu maupun sebagai sebuah kelompok masyarakat.
- 3) Versi ketiga ialah yang menuliskan bahwa kata "MARSUSU" berasal dari kata yaitu dari nama seorang pemilik kedai, yang letak kedainya tepat ditengah-tengah daerah ini. Kedai tersebut konon menjadi tempat persinggahan kafilah ke dan dari Bone-Gowa, sehingga oleh para kafilah tersebut berpapasan, tempat mereka mengemasi dan beristirahat di "MARSUSU" sehingga berasal dari nama pemilik kedai yang berkembang menjadi nama "MARSUSU".

Dalam Lontara Patturioloanga Ri Gowa tercatat adanya sebuah kerajaan yang bernama kerajaan "MARSUSU". Kapan berdirinya tidak diketahui pasti, tetapi

diperkirakan kerajaan "MARUSU" berdiri dengan Raja I Karaeng Loe Ri Pakere, ketika di kerajaan Gowa mulai surut. Pemerintahan I Pakere Tau Tunijallo Ri Pasukki Raja Gowa VIII sekitar tahun 1463 diperkirakan kerajaan "MARUSU" berdiri ditengah-tengah kerajaan kecil di Sulawesi Selatan pada zamannya.

Dalam konjungtur sejarahnya selama lima abad dimulai dengan berdirinya kerajaan "MARUSU" oleh raja I Karaeng Loe Ri Pakare pada awal abad XV sampai berdirinya Toddo Limaiyya Ri Marusu dan Lobbo Tengngae pada abad XVIII, yang selanjutnya terjadi kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem *Monarchi* menjadi daerah *Reguntshap* kemudian menjadi distrik, maka dalam *Gemenshad* sampai dekade terakhir menjadi Tradisonal dengan pemerintahan Konstitusional dengan lahirnya undang-undang No. 29 tahun 1959 (14 tahun) setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Undang-undang tersebut menjadi dasar berdirinya daerah tingkat II kabupaten Maros dengan wilayah yang meliputi gabungan tiga Persekutuan Adat, masing-masing **Toddo Lamaiyya Ri Marusu, Lobbo Tengngae dan Gallareng Apaka**, meskipun kemudian daerah Gallareng Apakka (kecuali moncongloe) menjadi bagian kotamadya Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejak tanggal 1 Juni 1963 Kabupaten Maros tidak lagi berdiri atas Distrik yang dikepalai oleh Karaeng, tetapi terbagi atas empat buah kecamatan yang dipimpin oleh camat. Keempat kecamatan tersebut terdiri atas :

1. Kecamatan Maros Baru
2. Kecamatan Bantimurung

3. Kecamatan Mandai
4. Kecamatan Camba

Keempat kecamatan tersebut sampai tahun 1998 dan bertambah lagi dengan adanya pemekaran dengan masing-masing kecamatan menjadi dua kecamatan, sehingga saat ini Maros sudah menjadi delapan kecamatan.

Setelah keluarnya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan dan otonomi daerah, maka secara praktis daerah tingkat II Kabupaten Maros berubah menjadi Pemerintah Kabupaten Maros, seperti daerah tingkat II diseluruh Indonesia Pada saat yang sama Bupati Kabupaten Maros kembali mengeluarkan pemekaran kecamatan dengan pertimbangan mendekati pemerintah dengan rakyatnya secara struktual dan kultural sehingga saat ini kabupaten Maros sudah menjadi 12 kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Maros Baru
2. Kecamatan Camba
3. Kecamatan Bantimurung
4. Kecamatan Malawa
5. Kecamatan Maros Utara
6. Kecamatan Tanralili
7. Kecamatan Bontoa
8. Kecamatan Turikale
9. Kecamatan Marusu
10. Kecamatan Moncongloe

11. Kecamatan Simbang

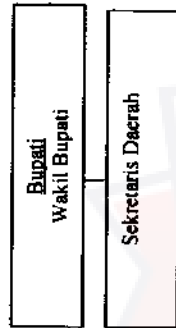
12. Kecamatan Mandai

Kedua belas kecamatan itu sekarang telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan fungsi, guna melayani masyarakat di wilayahnya demi terwujudnya kesejahteraan, keadilan guna tercapainya Good Governance.

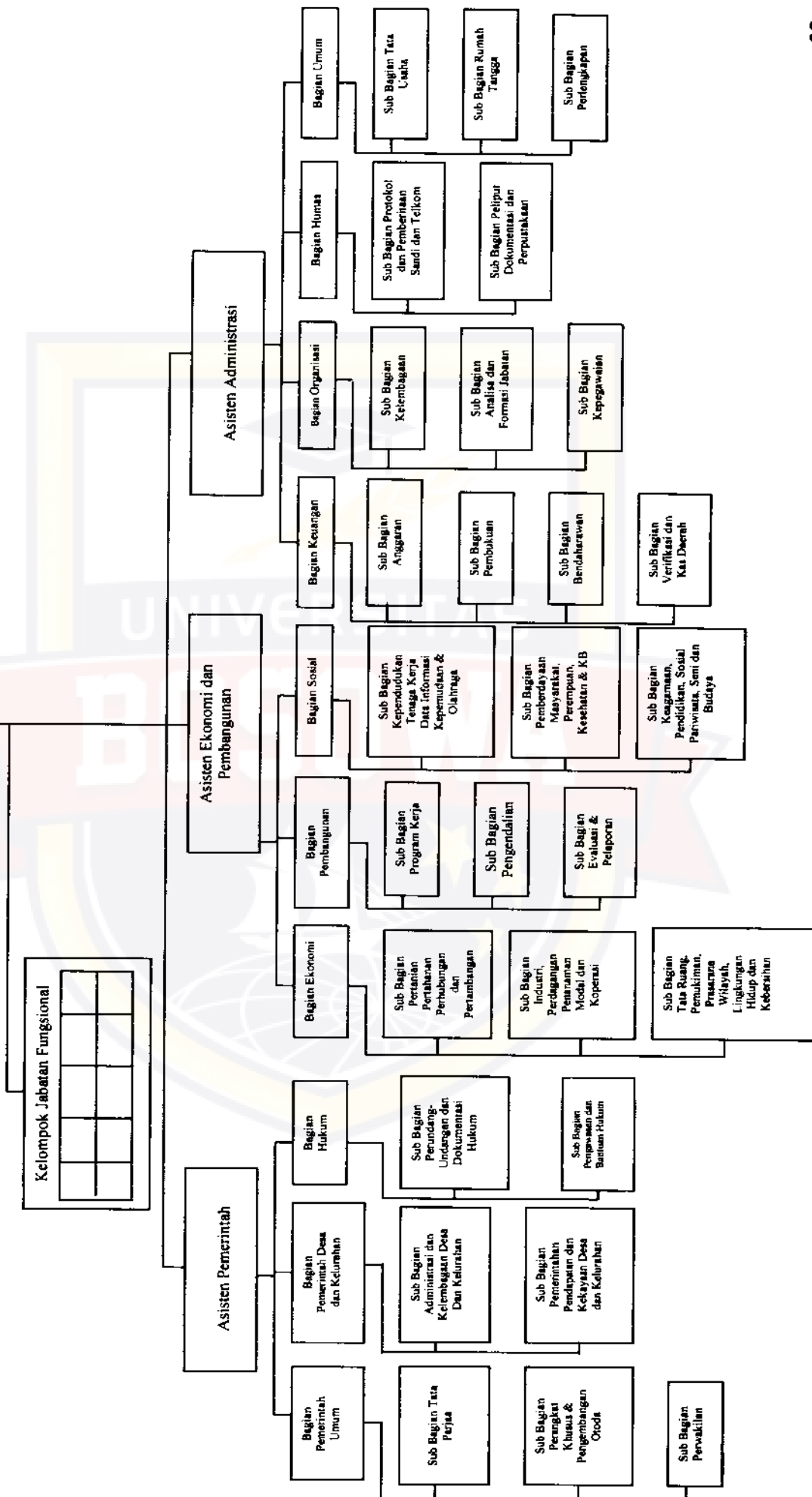
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Maros

Suatu organisasi adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama, agar aktivitas organisasi yang dijalankan oleh orang-orang yang ada didalamnya dapat berjalan dengan baik. Apalagi makin besar suatu organisasi struktur organisasi pemerintahan makin kompleks hubungan aktivitas didalamnya, maka dibentuklah struktur organisasi yang menggambarkan suatu sistem tugas, wewenang dan tanggung jawab serta fungsinya masing-masing pegawai pemerintah yang ada dalam organisasi tersebut. Adapun gambar struktur organisasi pemerintah kabupaten Maros sebagai berikut :

KABUPATEN MAROS



Sesuai dengan PERDA Kab. Maros No. 16 Tahun 2003 Tanggal 17 Desember 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Maros



4.1.3 Analisa Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Maros menggunakan bentuk struktur organisasi garis dan staf. Hal ini relevan dengan luas dan besarnya wilayah kekuasaan serta yang terpenting adalah tidak bertentangan aturan dari pusat. Sebagai pemerintahan kabupaten tentunya memiliki visi dan misi pemerintahan, maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab.

Pada proses operasional khususnya mengenai pengaturan lalu lintas keuangan daerah dikendalikan oleh Bupati sebagai penanggungjawab umum dalam pemerintahan di daerah. Dalam struktur organisasi tampak bahwa terjadi pendelegasian wewenang dan tugas yang masing-masing sebagai berikut :

a. Bupati (wakil Bupati)

Pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang dipilih secara bersamaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Guna untuk menjalankan visi dan misi pemerintahannya, maka tentunya telah hadir perangkat-perangkat kelembagaan sebelum dia masuk sebagai seorang bupati. Hanya saja bupati mempunyai keleluasaan untuk merombak struktur dan fungsi dalam pemerintahan sesuai dengan peraturan yang ada, dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemegang mandat rakyat. Akan tetapi guna memudahkan bupati dalam menjalankan aktivitas pemerintahan maka sebagian tugas dan kewenangannya dilimpahkan kepada sekretaris kabupaten sebagai pimpinan sekretariat kabupaten dan instansi fungsional yang ada didaerahnya.

b. Sekretaris Kabupaten

Sekretaris Kabupaten, adalah kepala sekretariat kabupaten yang membawahi semua instansi pemerintahan, baik secara struktural maupun fungsional. Dalam rangka memudahkan kerja-kerja sekretaris kabupaten maka wewenang dan fungsinya didelegasikan kepada asisten-asisten dan lembaga-lembaga fungsional lainnya. Sehingga secara nyata tinggal mengontrol secara administratif tentunya dengan dibantu oleh para stafnya.

c. Asisten Pemerintahan

Asisten pemerintahan bertanggungjawab kepada sekretaris kabupaten, dan untuk memudahkan seorang asisten pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka dibantu oleh beberapa bagian antara lain :

c.1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum

Kepala bagian umum mempertanggungjawabkan jalannya pemerintahan secara umum kepada atasannya dan dibantu oleh beberapa kepala sub bagian, yakni :

c.1.1. Sub Bagian Tata Praja

Kepala sub bagian tata praja bertugas untuk mengatur ketata prajaan secara keseluruhan dalam lingkup kabupaten dan mempertanggung jawabkannya kepada atasannya.

c.1.2. Sub Bagian Perangkat Khusus Pengembangan Otonomi Daerah

Kepala sub bagian ini, bertanggungjawab untuk mengkaji secara filosofi otonomi daerah, dan mengembangkannya guna semakin

memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

c.1.3. Sub Bagian Perwakilan

c.2. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Kepala bagian pemerintahan desa dan kelurahan bersentuhan langsung dengan aparat desa dan kelurahan. Sehingga setiap persoalan yang akan muncul dan terjadi dibawah tanggungjawabnya dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada asisten pemerintahan.

c.2.1. Sub Bagian Administrasi dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan

Kepala sub bagian administrasi dan kelembagaan desa serta kelurahan mengontrol desa dan kelurahan secara administratif serta memperhatikan struktur kelembagaan desa dan kelurahan.

c.2.2. Sub Bagian Pemerintahan, Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Kelurahan

Kepala sub bagian ini, mengontrol pemerintahan, pendapatan, kekayaan desa serta kelurahan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sebuah referensi guna memperkuat posisi desa dan kelurahan demi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c.3. Bagian Hukum

Kepala bagian hukum mempertanggungjawabkan pekerjaan pemerintahan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada dan bertanggungjawab kepada asisten pemerintahan.

c.3.1. Sub Bagian Peraturan, Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum.

Kepala sub bagian ini bertanggungjawab menyusun peraturan-peraturan daerah dan menterjemahkan peraturan-peraturan pemerintah baik dari Pusat, Propinsi maupun secara horisontal dengan daerah lain.

c.3.2. Sub Bagian Pengawasan dan Bantuan Hukum.

Kepala sub bagian pengawasan dan bantuan hukum bertugas untuk mengawasi jalannya peraturan dan kebijakan pemerintah kabupaten jika diperlukan dan masyarakat lainnya jika dibutuhkan.

d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Asisten ekonomi dan pembangunan mempertanggungjawabkan persoalan perekonomian dan pembangunan kepada sekretaris kabupaten. Dalam rangka untuk memperlancar jalannya roda pembangunan dan perekonomian, maka asisten ini dibantu oleh beberapa staf dibawahnya antara lain :

d.1. Bagian Ekonomi

Kepala bagian ekonomi bertugas untuk menganalisis dan mengontrol perekonomian diseluruh daerah kabupaten dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian secara umum.

d.1.1. Sub Bagian Pertanian Peternakan Perhubungan dan Pertambangan.

Kepala sub bagian ini, berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi persoalan-persoalan dibagiannya, serta

menyelesaikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan tetap berkoordinasi dengan atasan dan staf yang ada dibawahnya.

d.1.2. Sub Bagian Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi.

Kepala sub bagian ini, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan industri kecil, memperlancar perdagangan dan penanaman modal kepada koperasi.

d.1.3. Sub Bagian Tata Ruang, Pemukiman, Prasarana Wilayah, Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Kepala sub bagian ini, bertanggungjawab tentang penataan ruang, penataan pembangunan, pemukiman serta lingkungan hidup yang ada didaerahnya dengan tetap berkoordinasi dengan atasannya dan lembaga fungsional terkait.

d.2. Bagian Pembangunan

Kepala bagian pembangunan bertugas untuk memperlancar pembangunan di kabupaten dengan tetap berkoordinasi dengan instansi fungsional dan bertanggungjawab kepada asisten pembangunan dan ekonomi.

d.2.1. Sub Bagian Program Kerja

Kepala sub bagian program kerja, bertugas untuk merumuskan program kerja pembangunan selama satu periode lalu meretaskannya persemester dan menjadi skala prioritas.

d.2.2. Sub Bagian Pengendalian

Kepala sub bagian ini, bertanggungjawab mengendalikan jalannya

pembangunan dan mempertanggungjawabkan kepada atasannya.

d.2.3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Kepala sub bagian ini bertugas untuk mengevaluasi jalannya pembangunan dan ekonomi dan melaporkan kepada atasan hasil-hasil pembangunan tersebut, termasuk keganjilan dan kegagalan yang ditemukan dilapangan.

e. Asisten Administrasi

Asisten administrasi, berkewajiban untuk mengetahui secara keseluruhan proses administrasi yang terjadi dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Maros. Karena luasnya cakupan wilayah kerjanya, maka dihadirkan beberapa perangkat dibawah ini untuk menjaga keberlangsungan tugas dan tanggungjawabnya.

e.1. Bagian Keuangan

Kepala bagian keuangan bertugas untuk mengatur sirkulasi keuangan daerah serta bertanggungjawab untuk menjaga jangan sampai terjadi kekosongan kas daerah. Bagian ini bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi dengan dibantu oleh beberapa sub bagian :

e.1.1. Sub Bagian Anggaran

Kepala bagian sub ini, bertugas untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah serta bertanggungjawab kepada bagian keuangan.

e.1.2. Sub Bagian Pembukuan

Kepala sub bagian pembukuan bertugas untuk mencatat dan

membukukan proses penerimaan dan pengeluaran daerah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian keuangan.

e.1.3. Sub Bagian Bendaharawan

Kepala sub bagian bendaharawan mempunyai tugas dan fungsi serta kewajiban untuk menjaga kas kecil daerah sehingga keuangan daerah tidak bisa habis. Dan semua pengeluaran dan penerimaan kas diketahui dan dicatat oleh bagian ini.

e.1.4. Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah

Kepala sub bagian ini bertugas untuk memperjelas penerimaan dan pengeluaran dengan segala jenis dan bentuk pengeluaran tersebut.

e.2. Bagian Organisasi

Kepala bagian organisasi, mempunyai tugas menyusun struktur kelembagaan organisasi pemerintahan kabupaten dengan tetap mengedepankan kebutuhan dan kepatutan daerah

e.2.1 Sub Bagian Kelembagaan

Kepala sub bagian ini bertugas untuk menganalisa efektifitas kelembagaan yang ada, serta menganalisa fungsi dan tujuannya sehingga tidak terjadi kontradiksi antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya.

e.2.2. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan

Kepala sub bagian ini, bertugas untuk menganalisis format

kelembagaan sekaligus formasi jabatan struktur dan fungsional sehingga tidak berpengaruh secara psikologis antara jabatan yang satu dengan yang lainnya.

e.2.3. Sub Bagian Kepegawaian

Kepala sub kepegawaian bertugas untuk menganalisa, mengamati dan mempromosikan pegawai termasuk didalamnya mempertimbangkan perlu tidaknya pengurangan atau penambahan jumlah pegawai.

e.3. Bagian Humas

Bagian humas bertugas dan bertanggungjawab untuk menyampaikan atau menyebarluaskan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten, sehingga posisi ini biasa dianggap sebagai corong pemerintah.

e.3.1. Sub Bagian Protokol, Pemberitaan Sandi, dan Telkom.

Kepala sub bagian ini, bertugas untuk menjadi protokoler pemberitaan sehingga setiap ada kebijakan yang perlu diangkat maka, bagian ini yang bertanggungjawab termasuk didalamnya bagaimana menyeleksi berita yang akan diangkat oleh media dalam lingkup pemerintah kabupaten.

e.3.2. Sub Bagian Peliput, Dokumentasi dan Perpustakaan.

Kepala sub bagian ini, bertugas untuk meminta media meliput kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu, menyimpan dokumentasi dan membuat perpustakaan khususnya mengenai kebijakan-

kebijakan pemerintah kabupaten dan buku yang menyangkut pemerintahan.

e.4. Bagian Umum

Kepala bagian umum bertugas secara umum mengenai kelengkapan-kelengkapan pemerintahan termasuk didalamnya kebutuhan yang dianggap perlu untuk memperlancar aktifitas pemerintahan.

Sub Bagian Tata Usaha dalam kegiatan pemerintah atau

e.4.1 Kepala bagian tata usaha bertugas untuk mengurus persoalan administrasi, perlengkapan operasional kegiatan pemerintah.

e.4.2 Sub Bagian Rumah Tangga kepala sub bagian rumah tangga bertugas dan bertanggungjawab mengenai keperluan-keperluan kantor dan bertanggungjawab kepada atasannya.

e.4.3 Sub Bagian Perlengkapan

Kepala sub bagian perlengkapan bertugas untuk menyimpan dan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan oleh kantor.

4.2. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Sekertariat Daerah Pemda Kab.

Maros

4.2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Sekertariat Daerah Pemda Kab.

Maros

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan di Pemda Kab. Maros adalah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Itupun penerapannya belum menyuluruh seperti apa yang diatur pada Kepmendagri tersebut. Karena ternyata ada beberapa item yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan teknis dan kemampuan Pemda

Pada dasarnya, semua unit kerja didalam lingkup Pemda Kabupaten Maros, tidak terkecuali pada Sekertariat Daerah, masih menganut sistim pembukuan (*Single Entry*). Pada Sekretariat Daerah setiap penerimaan dan pengeluaran di Kas Daerah dicatat didalam Buku Besar Penerimaan (Formulir B. IV) dan Buku Besar Pengeluaran (Formulir B. V).

Secara garis besarnya, prosedur pengadaan asset tetap di Sekertariat Daerah Pemda Kabupaten Maros dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK ini merupakan dokumen yang memuat rancangan anggaran Unit Kerja sebagai sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan RASK yang disampaikan Unit Kerja Tim



Anggaran Eksekutif, dalam hal ini Pemda Kab. Maros, mengevaluasi dan menganalisis :

1. Kesesuaian antara Rancangan Anggaran Unit Kerja dengan Program dan Kegiatan yang direncanakan Unit Kerja.
2. Kesesuaian program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja.
3. Kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan SAB yang telah diperhitungkan.

RASK memuat informasi mengenai unit kerja antara lain mengenai :

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran
3. Tugas Pokok dan Fungsi
4. Bidang, Program, dan Kegiatan
5. Anggaran

RAPBD dari Bagian Anggaran kemudian diajukan ke DPRD untuk kemudian disetujui menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Atas dasar APBD ini, Unit Kerja kemudian membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Bagian Anggaran kemudian membuat Surat Keterangan Otorisasi (SKO).

DASK sendiri terdiri dari DASK Belanja Administrasi Umum, DASK Belanja Gaji, DASK Tunjangan Beras, DASK Pedapatan, DASK Belanja Operasi dan Pemeliharaan, DASK Belanja Modal, DASK Belanja Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan.

Berdasarkan DASK dan SKO ini, Unit Kerja kemudian membuka lelang tender pengadaan asset yang tercantum dalam APBD. Adapun menyangkut masalah tender pengadaan Aset di Pemda Kab. Maros, masih beracuan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada BAB II, Bagian ketujuh, paragraph Pertama pasal 17 ayat (1) sampai (5) diatur metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/ Jasa Lainnya dapat berupa Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, dan Penunjukan Langsung.

Sebagai akibat dari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui empat metode pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa tersebut, Satuan Kerja kemudian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang kemudian diajukan pada Bagian Perbendaharaan yang kemudian menjadi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Bendahara Umum. Atas dasar SPM ini, Bagian Pembukuan kemudian melakukan pencatatan pada Buku Besar Pengeluaran Kas (Formulir B. V)

4.2.2 Prosedur Pengklasifikasian, Pengukuran dan Pencatatan Aset Tetap pada Sekertariat Daerah Pemda Kab. Maros.

Menurut Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pada bagian Lampiran XXIX mengenai kebijakan akuntansi aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dari dana

yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya.

Aktiva tetap menurut Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 terdiri dari Tanah, Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan, Gedung, Mesin dan Peralatan, Kendaraan, Meubelair dan Perlengkapan, Buku Perpustakaan.

a. Tanah

Tanah meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Dalam hal pengukuran nilai tanah berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi Jalan, jembatan, terowongan, dan lain-lain jenisnya.

Dalam hal pengukuran nilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini

meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

c. Bangunan Air

Bangunan Air meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor dan bangunan air yang sejenis.

Dalam hal pengukuran nilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membangun irigasi sampai siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah).

d. Instalasi dan Jaringan

Instalasi dan Jaringan meliputi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Dalam hal pengukuran nilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah).

e. Gedung

Gedung meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Dalam hal pengukuran nilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

f. Mesin dan Peralatan

Mesin dan Peralatan meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor/bengkel/studio/pertanian/kedokteran/laboratorium/kesenian/olahraga, mesin dan peralatan persenjataan, dan lain-lain sejenisnya.

Dalam hal pengukuran nilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga beli, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

g. Kendaraan

Kendaraan meliputi kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya.

Dalam hal pengukuran nilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga beli, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan

h. Meubelair dan Perlengkapan

Meubelair dan perlengkapan meliputi inventaris dan perlengkapan kantor, inventaris dan perlengkapan rumah tangga, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan dan lain-lain sejenisnya.

Dalam hal pengukuran nilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga beli dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan

i. Buku Perpustakaan

Buku Perpustakaan meliputi buku umum, buku filasafat, buku agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, manajemen, akuntansi, pengetahuan praktis, arsitektur, kesenian, olah raga, geografi, biologi, sejarah, dan lain-lain sejenisnya.

Dalam hal pengukuran nilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

j. Aktiva lain-lain

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan dana cadangan. Aktiva lain-lain meliputi piutang angsuran, *Built, Operate and Transfer (BOT)*, dan Bangunan dalam pengerjaan.

Pada Bagian Pembukuan, Aset Tetap dicatat pada Buku Besar Pengeluaran Kas

(Formulir B. V) sebesar nilai nominal yang tercantum pada Surat Perintah Membayar, dimana jumlah yang tertera merupakan Biaya Perolehan Aset yang bersangkutan. Adapun secara Fisik, Aktiva tetap bersangkutan berada pada unit kerja yang mengusulkan pengadaan aset tersebut.

Aktiva tetap yang dipeoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aktiva tetap. Pengungkapan nilai aktiva tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

Pelepasan aktiva tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aktiva tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aktiva tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh atau nilai wajar aktiva yang diserahkan.

Penghapusan aktiva tetap dilakukan jika aktiva tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan nilai aktiva tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.



**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
SEKDA KAB. MAROS
TAHUN 2005**

No	Dimas Satuan Kerja	A S E T T E T A P															
		Tanah	Jln. & Jemb atan	Bang. Air	Jarin gan	Bang Gedung	Mon umen	Alat Angkut	Alat Besar	Alat Ktor & RT	Alat Studio & Kom	Alat Kedokteran	Alat Lab	Buku Perpus	Btg B corak Kebud	Aset Tetap Lainnya	Proyek Dtm Pengerjaan
1	Bupat	-	-	-	-	-	-	-	-	668.934.805	4.915.000	-	-	-	-	-	-
2	Wk Bupat	-	-	-	-	-	-	-	-	241.390.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Sekda	-	-	-	-	-	-	-	-	488.760.100	-	-	-	-	-	-	-
4	Bag Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	30.612.500	-	-	-	-	-	-	-
5	Bag Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	23.510.000	-	-	-	-	-	-	-
6	Bag Perkonomian	-	-	-	-	-	-	-	-	20.458.000	-	-	-	-	-	-	-
7	Bag Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	101.750.000	-	-	-	-	-	-	-
8	Bag Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	57.217.500	-	-	-	-	-	-	-
9	Bag Umum	11.340.000	-	-	-	-	-	-	-	62.602.500	-	-	-	-	-	-	-
10	Bag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	186.497.500	-	-	-	-	-	-	-
11	Bag. Humas	-	-	-	-	-	-	-	-	42.373.000	-	-	-	-	-	-	-
12	Bag. Pem. Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	28.662.500	-	-	-	-	-	-	-
13	Bag. Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	18.630.000	-	-	-	-	-	-	-

(Sumber : Sub. Bag. Anggaran Sekda Kab. Maros Tahun 2005)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Nama Satuan Kerja : Sekretariat Daerah Kab. Maros

Kode Satuan Kerja :

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Maros

Telp :

Kode Rek.	Kode Aset	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Bantuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Ket.
									B	R/R/ RB		
0 1												
0 2												
0 3												
0 4												
0 5												
0 6												
0 7												
0 8												
0 9												
1 0												
1 1												
1 2												
1 2 0 1												
Sekretaris Kabupaten Maros												
				1998	1	Buah	3.500.000	3.500.000			Sekda	APBD II
				1999	1	Buah	1.500.000	1.500.000			Sekda	APBD II
				2002	1	Buah	1.500.000	1.500.000			Sekda	APBD II
				2002	15	Buah		5.250.000			Sekda	APBD II

Kode Rekr.	Kode Aset	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Keperluan	Ket.
									B	RR/RS		
	5 Kursi Pukir	12 02 01 30		2001	1	Buah	350,000	350,000	√		Selesai	APBD II
	6 Rak Arap	12 02 04 03		2002	1	Buah	4,000,000	4,000,000	√		Selesai	APBD II
	7 Meja Komputer	12 02 01 37		2001	1	Buah		210,000	√		Selesai	APBD II
	8 Meja Staf	12 02 01 48		2002	3	Buah		600,000	√		Selesai	APBD II
	9 Meja Staf pakai Air Conditionera	12 02 01 48		2001	2	Buah		700,000	√		Selesai	APBD II
	10 Kursi tempas lengan (Merah)	12 02 01 06		2002	5	Buah		1,025,000	√		Selesai	APBD II
	11 Kursi tempas lengan (Abu-abu)	12 02 01 05		2001	5	Buah		875,000	√		Selesai	APBD II
	12 Pesawat Fax	13 02 01 11		2001	1	Buah	1,200,000	1,200,000	√		Selesai	APBD II
	13 Lemari Arap	12 02 01 01		2002	1	Buah	4,000,000	4,000,000	√		Selesai	APBD II
	14 Meja Tamu	12 02 01 28		2002	1	Buah	1,750,000	1,750,000	√		Selesai	APBD II
	15 Meja makan bundar	12 02 01 12		2002	1	Buah	2,000,000	2,000,000	√		Selesai	APBD II
	16 Kursi tamu	12 02 01 28		2002	1	Buah	6,000,000	6,000,000	√		Selesai	APBD II
	17 Televisi	12 02 06 03	Panasonic	2000	1	Buah	2,892,000	2,892,000	√		Selesai	APBD II
	18 Air Conditioner	12 02 04 04	Split	2004	2	Buah	12,000,000	24,000,000	√		Selesai	APBD II
	19 Air Conditioner	12 02 04 04	Split	2002	1	Buah	8,000,000	8,000,000	√		Selesai	APBD II
	20 Komputer	12 02 04 04	Split	2002	1	Set	7,900,000	7,900,000	√		Selesai	APBD II
	21 Lambang Garuda	12 03 01 02		2001	1	Set	75,000	75,000	√		Selesai	APBD II
	22 Foto Presiden + Wakil Presiden	12 02 06 28		2000	1	Buah	150,000	150,000	√		Selesai	APBD II
	23 Foto Gubernur + Wakil Gubernur	12 02 06 29		2003	1	Pasang	150,000	150,000	√		Selesai	APBD II
	24 Telepon	13 02 01 11		2002	1	Buah	275,000	275,000	√		Selesai	APBD II
	Asisten Pemerintahan											
	1 Meja Tamu & Kursi Tamu	12 04 02 09 & 12 04 06 06		2002	1	Set	3,000,000	3,000,000	√		Selesai	APBD II
	2 Lemari Pakelan	12 02 01 54		2002	1	Buah	3,000,000	3,000,000	√		Selesai	APBD II
	3 Air Conditioner	12 02 04 04	Kohler	2002	1	Buah	4,750,000	4,750,000	√		Selesai	APBD II
	4 Komputer	12 03 01 01		2001	1	Set	9,500,000	9,500,000	√		Selesai	APBD II
	5 Meja Pimpinan & Meja Telepon	12 04 01 04 & 12 02 01 13		1999	2	Buah	2,400,000	2,400,000	√		Selesai	APBD II
	6 Kursi Pimpinan	12 04 03 04		1999	1	Buah	900,000	900,000	√		Selesai	APBD II
	7 Meja Rapat Segi Empat	12 04 02 04		2002	1	Buah	5,000,000	5,000,000	√		Selesai	APBD II
	8 Kursi Rapat	12 04 04 04		2002	6	Buah	1,800,000	1,800,000	√		Selesai	APBD II
	9 Kursi Staf	12 02 01 31		2002	4	Buah	820,000	820,000	√		Selesai	APBD II
	10 Meja Staf	12 02 01 48		2001	1	Buah	607,500	607,500	√		Selesai	APBD II
	11 Telepon	13 02 01 11		2002	1	Buah	275,000	275,000	√		Selesai	APBD II
	12 Meja Telepon	13 02 01 11		1999	1	Buah		271,000	√		Selesai	APBD II
	13 Meja Tamu	12 04 02 09		1999	1	Buah		350,000	√		Selesai	APBD II
	Ruang Asisten Elberg Setda											
	1 Lemari Arap	12 02 04 03		2002	1	Buah	1,850,000	1,850,000	√		Selesai	APBD II

Kode Rek.	Kode Aset	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Ket.
									B	R/R		
	12 04 02 09 & 12 04 06 04											
	12 02 04 04			2002	2	Buah	3.000.000	6.000.000	√		Setida	APBD II
	12 02 08 39		Kohler	2002	2	Buah	4.750.000	9.500.000	√		Setida	APBD II
	12 03 01 01		Pendum III	2002	1	Buah	750.000	750.000	√		Setida	APBD II
	12 04 01 04 & 12 02 01 11			1999	2	Set	9.400.000	9.400.000	√		Setida	APBD II
	12 04 03 04			1999	1	Buah	1.200.000	1.200.000	√		Setida	APBD II
	12 04 02 04			2002	1	Buah	900.000	900.000	√		Setida	APBD II
	12 04 04 04			2002	6	Buah	5.000.000	5.000.000	√		Setida	APBD II
	12 02 01 31			2002	6	Buah	1.800.000	1.800.000	√		Setida	APBD II
	12 02 01 48			2001	9	Buah	1.845.000	1.845.000	√		Setida	APBD II
	13 02 01 11			2002	2	Buah	1.215.000	1.215.000	√		Setida	APBD II
	12 02 01 11			2002	1	Buah	275.000	275.000	√		Setida	APBD II
	12 04 02 09			2002	1	Buah	800.000	800.000	√		Setida	APBD II
				2002	1	Buah	250.000	250.000	√		Setida	APBD II
							900000					
							250000					
	12 04 01 06			1999	1	Buah	2.400.000	2.400.000	√		Setida	APBD II
	12 04 03 06			1999	1	Buah	900.000	900.000	√		Setida	APBD II
	12 04 02 04			2002	1	Buah	5.000.000	5.000.000	√		Setida	APBD II
	12 04 04 04			2002	6	Buah	300.000	1.800.000	√		Setida	APBD II
	12 02 01 31		Victor	2001	1	Buah	607.500	607.500	√		Setida	APBD II
	12 02 01 31			2002	9	Buah	205.000	1.845.000	√		Setida	APBD II
	12 02 04 11				1	Buah	208.000	208.000	√		Setida	APBD II
	12 02 04 03				1	Buah	475.000	475.000	√		Setida	APBD II
	12 04 02 09		Ligna	2000	2	Buah	1.275.000	2.550.000	√		Setida	APBD II
	12 02 04 04		Sphi	2002	1	Buah	6.000.000	6.000.000	√		Setida	APBD II
	12 02 01 54			2002	1	Buah	3.000.000	3.000.000	√		Setida	APBD II
	12 03 01 01			2002	1	Set	6.500.000	6.500.000	√		Setida	APBD II
	12 04 06 04			2000	1	Paket	1.500.000	1.500.000	√		Setida	APBD II
	12 02 04 04		Kohler	2002	1	Buah	8.000.000	8.000.000	√		Setida	APBD II
	12 02 01 19				4	Buah	823.000	3.292.000	√		Setida	APBD II
	12 02 01 30			2002	13	Buah	450.000	5.850.000	√		Setida	APBD II
	12 02 01 30			2000	2	Buah	990.000	1.980.000	√		Setida	APBD II
	12 02 01 34			2004	15	Buah	150.000	2.250.000	√		Setida	APBD II
	12 02 01 31			2003	30	Buah	29.000	870.000	√		Setida	APBD II
					1	Buah	325.000	325.000	√		Benda	APBD II

Kode Rekr.	Kode Aset	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Sisa Nilai Kependidikan	Ket.
									■	R/R		
	12 02 01 48			1999	2	Buah	450,000	900,000	✓		Selida	APBD II
2 Meja Staf	12 02 01 48		Victor	2001	2	Buah	607,500	1,215,000	✓		Selida	APBD II
3 Meja Staf	12 02 01 30			1999	1	Buah	250,000	250,000	✓		Selida	APBD II
4 Kursi Putar Pakai Lengan	12 02 01 34			2004	4	Buah	150,000	600,000	✓		Selida	APBD II
5 Kursi Lipat	12 01 08 10			2002	1	Buah	123,000	123,000	✓		Selida	APBD II
6 White Board	13 02 01 11				1	Buah	276,000	276,000	✓		Selida	APBD II
7 Telepon												
Pembelian Perabot Maros di Jakarta												
1 Kursi Tamu Ular Jefera	12 02 01 28			2000	1	Buah	826,000	826,000	✓		Selida	APBD II
2 Meja Tamu	12 04 01 11			2000	1	Buah	2,100,000	2,100,000	✓		Selida	APBD II
3 Meja Kerja + Kursi	12 04 02 06			2000	1	Buah	725,000	725,000	✓		Selida	APBD II
4 Kursi Putar Pakai Tangan	12 02 01 30			2001	1	Buah	326,000	326,000	✓		Selida	APBD II
5 Kursi Plastik	12 02 01 31			2000	1	Buah	65,000	65,000	✓		Selida	APBD II
6 Komputer + Printer	12 03 01 01	Sumbaada		2003	1	Set		15,000,000	✓		Selida	APBD II
7 Komputer + Printer	12 03 01 01	Acar		2001	1	Set		13,880,000	✓		Selida	APBD II
8 Printer	12 03 04 06	Epson		2001	1	Buah	850,000	850,000	✓		Selida	APBD II
9 Scanner	12 03 04 10	Cannon		2003	1	Buah	2,100,000	2,100,000	✓		Selida	APBD II
10 Lembar Garuda	12 02 06 28			2000	1	Buah	128,900	128,900	✓		Selida	APBD II
11 Kelengkapan	12 02 08 27			2001	1	Buah	3,250,000	3,250,000	✓		Selida	APBD II
12 Peta Maros	12 02 06 45			2000	1	Buah	352,000	352,000	✓		Selida	APBD II
13 Permadani Sholat	12 02 01 46			2003	1	Buah	1,806,000	1,806,000	✓		Selida	APBD II
14 Peta Jakarta	12 02 06 45			2000	2	Buah	385,000	770,000	✓		Selida	APBD II
15 Kelengkapan	12 02 06 27			2000	2	Buah	3,200,000	6,400,000	✓		Selida	APBD II
16 Air Conditioner	12 02 04 04	PK		2003	1	Buah	7,280,000	7,280,000	✓		Selida	APBD II
17 Meja Makan & Kursi Jepara	12 02 01 12			2000	6	Buah	250,000	1,500,000	✓		Selida	APBD II
18 Lemari TV				2000	1	Buah	232,000	232,000	✓		Selida	APBD II
19 Televisi	12 02 06 03	Sony		2000	1	Buah	1,540,000	1,540,000	✓		Selida	APBD II
20 Aquarium	12 02 06 31			2002	1	Buah	536,000	536,000	✓		Selida	APBD II
21 Meja Makan Kaca	12 02 01 12			2002	1	Buah	320,000	320,000	✓		Selida	APBD II
22 Lemari Besel	12 01 04 01			2002	1	Buah	1,250,000	1,250,000	✓		Selida	APBD II
23 Kursi Tamu	12 02 01 28			2002	1	Set	1,500,000	1,500,000	✓		Selida	APBD II
24 Meja Tamu	12 02 01 29			2002	1	Buah	650,000	650,000	✓		Selida	APBD II
25 Dispenser	12 02 06 39			2001	1	Buah	800,000	800,000	✓		Selida	APBD II
26 Kulkas	12 02 04 01			2001	1	Buah	2,420,000	2,420,000	✓		Selida	APBD II
27 Jam Dinding	12 02 02 01			2000	1	Buah	150,000	150,000	✓		Selida	APBD II
28 Tempel Tidor	12 02 01 09	Alpa		2000	1	Buah	642,500	642,500	✓		Selida	APBD II
29 Kulkas	12 02 06 03	Uchida		2004	1	Buah	1,800,000	1,800,000	✓		Selida	APBD II

Kode Rek.	Kode Aset	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Setuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi:		Status Keperluan	Ket.
									B	R/R		
	30	Air Conditioner	Split Nasional	2000	1	Buah	7.280.000	7.280.000	√		Saida	APBD II
	31	Tempat Tidur		2000	1	Buah	642.500	642.500	√		Saida	APBD II
	32	Air Conditioner	Split Nasional	2000	1	Buah	7.280.000	7.280.000	√		Saida	APBD II
	33	Jam Dinding	Saiko	2000	1	Buah	125.000	125.000	√		Saida	APBD II
	34	Kapas Angin	Maspion	2000	1	Buah	300.000	300.000	√		Saida	APBD II
	35	Lemari		2000	1	Buah	250.000	250.000	√		Saida	APBD II
	36	Meja Hias		2000	2	Buah	645.000	1.290.000	√		Saida	APBD II
	37	Bantal & Guling		2000	1	Buah	105.000	105.000	√		Saida	APBD II
	38	Carmin		2000	1	Buah	188.000	188.000	√		Saida	APBD II
	39	Kompor	Rinne	2000	1	Buah	350.000	350.000	√		Saida	APBD II
	40	Lemari Meikan		2000	5	Buah	345.000	1.725.000	√		Saida	APBD II
	41	Tempat Beras	Cosmos	2000	1	Buah	230.000	230.000	√		Saida	APBD II
	42	Alat Dapur		2000	2	Buah	75.000	150.000	√		Saida	APBD II
	43	Pemanes Nasal	Young Ma	2000	1	Buah	175.000	175.000	√		Saida	APBD II
	44	Mesin Cuci	Whirlpool	2004	1	Buah	7.500.000	7.500.000	√		Saida	APBD II
	45	Tempat Tidur	Romance	2000	1	Buah	450.000	450.000	√		Saida	APBD II
	46	Lemari Pakaian		2003	1	Buah	523.000	523.000	√		Saida	APBD II
	47	Meja Rias & Kursi		2000	1	Buah	1.354.000	1.354.000	√		Saida	APBD II
	48	AC	Split Nasional 1 PK	2003	1	Buah	7.280.000	7.280.000	√		Saida	APBD II
	49	Tempat Tidur	Alpa	2000	2	Buah	1.285.000	2.570.000	√		Saida	APBD II
	50	AC	Split Nasional 1 PK	2000	1	Buah	7.280.000	7.280.000	√		Saida	APBD II
	51	Meja Kecil		2004	1	Buah	210.000	210.000	√		Saida	APBD II
	52	Carmin		2000	1	Buah	185.000	185.000	√		Saida	APBD II
	53	Gantungan Handuk		2000	1	Buah	175.000	175.000	√		Saida	APBD II
	54	Televisi	Sharp 21 Inc	2004	1	Buah	1.550.000	1.550.000	√		Saida	APBD II
	55	AC	Split 1 PK Nasional	2004	1	Buah	2.100.000	2.100.000	√		Saida	APBD II
	56	Lemari Arap 4 Susun		2004	4	Buah	198.000	792.000	√		Saida	APBD II
		Wisma Baritimurung di Jakarta										
		1 Meja Kursi		2004	1	Buah	475.000	475.000				
		2 Kursi Kerja		2004	1	Buah	325.000	325.000				
		3 Meja Meeting		2004	1	Buah	545.000	545.000				
		4 Kursi Meeting		2004	50	Buah	101.000	5.050.000				
		5 Lemari Pelangan		2004	1	Buah	655.000	655.000	√		Saida	APBD II
		6 Tabung Pemadam		2004	1	Buah	3.100.000	3.100.000	√		Saida	APBD II

Kode Rekr.	Kode Aset	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Ket.
									B	R/R/RB		
	7	Lampu Emergency		2004	1	Buah	178.900	178.900	√		Sewa	APBD II
	8	Tabung Pemadam		2004	1	Buah	2.500.000	2.500.000	√		Sewa	APBD II
	9	Lampu Emergency		2004	1	Buah	178.900	178.900	√		Sewa	APBD II
	10	Pemadam Kebakaran		2004	1	Buah	2.650.000	2.650.000	√		Sewa	APBD II
	11	White board		2004	1	Buah	287.300	287.300	√		Sewa	APBD II
	12	Bungkus Kupu-Kupu		2004	2	Buah	329.000	658.000	√		Sewa	APBD II
	13	Telepon	PABX	2004	1	Buah	183.000	183.000	√		Sewa	APBD II
	14	Jam Dinding		2004	15	Buah	158.000	2.370.000	√		Sewa	APBD II
	15	Jam Dinding		2004	1	Buah	150.000	150.000	√		Sewa	APBD II
	16	Asbak	Starline	2004	2	Buah	55.000	110.000	√		Sewa	APBD II
	17	Sofa Temu & Meja		2004	2	set	950.000	1.900.000	√		Sewa	APBD II
	18	Meja Kursi Belah		2004	1	set	245.000	245.000	√		Sewa	APBD II
	19	Rak Buku		2004	1	Buah	384.000	384.000	√		Sewa	APBD II
	20	Kursi Kerja Reception		2004	1	Buah	3.250.000	3.250.000	√		Sewa	APBD II
	21	Tempat Tidur	Alga	2000	2	Buah	350.000	700.000	√		Sewa	APBD II
	22	Tempat Tidur	Echwell	2000	2	Buah	350.000	700.000	√		Sewa	APBD II
	23	Tempat Tidur	Ligna	2000	1	Buah	375.000	375.000	√		Sewa	APBD II
	24	Air Conditioner	1 PK	2000	1	Buah	2.350.000	2.350.000	√		Sewa	APBD II
	25	Cermin		2000	1	Buah	285.000	285.000	√		Sewa	APBD II
	26	Tempat Tidur	Game	2000	1	Buah	345.000	345.000	√		Sewa	APBD II
	27	Laman Paksi 2 Pintu		2000	1	Buah	534.000	534.000	√		Sewa	APBD II
	28	Kipas Angin	Maspion	2000	1	Buah	320.000	320.000	√		Sewa	APBD II
	29	Cermin		2000	1	Buah	183.000	183.000	√		Sewa	APBD II
	30	Jam Dinding		2000	1	Buah	145.000	145.000	√		Sewa	APBD II
	31	Seperl		2000	18	Buah	155.000	2.790.000	√		Sewa	APBD II
	32	Tempat Tidur	Prince	2004	1	Buah	450.000	450.000	√		Sewa	APBD II
	33	Laman Paksi 4 Pintu		2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	√		Sewa	APBD II
	34	Bantal & Guling		2004	4	Buah	55.000	220.000	√		Sewa	APBD II
	35	Meja Rias		2004	1	Buah	325.000	325.000	√		Sewa	APBD II
	36	Televisi Warna	Sharp	2004	1	Buah	1.550.000	1.550.000	√		Sewa	APBD II
	37	Lemari Es		2004	1	Buah	1.800.000	1.800.000	√		Sewa	APBD II
	38	Air Conditioner	PK	2004	1	Buah	1.650.000	1.650.000	√		Sewa	APBD II
	39	Pernapas Air		2004	1	Buah	125.000	125.000	√		Sewa	APBD II
	40	Gorden		2004	1	Buah	110.000	110.000	√		Sewa	APBD II
	41	Terasi Besi		2004	1	Buah	1.320.000	1.320.000	√		Sewa	APBD II
	42	Televisi Warna	Sharp 21"	2004	1	Buah	1.650.000	1.650.000	√		Sewa	APBD II

Kode Rekr.	Kode Aset	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kendali		Status Kepemilikan	Ket.
									B	R/R/RS		
	43	Air Conditioner	PK	2004	1	Buah	2.730.000	2.730.000	√		Sewa	APBD II
	44	Kulkas	Uchida	2004	1	Buah	2.420.000	2.420.000	√		Sewa	APBD II
	45	Tempat Tidur	Prince	2004	1	Buah	560.000	560.000	√		Sewa	APBD II
	46	Meja Rias & Kursi		2004	1	Buah	425.000	425.000	√		Sewa	APBD II
	47	Lemari 4 pintu		2004	1	Buah	545.000	545.000	√		Sewa	APBD II
	48	Bantal & Guling		2004	1	Buah	55.000	55.000	√		Sewa	APBD II
	49	Televisi	Sharp 21"	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	√		Sewa	APBD II
	50	Air Conditioner	Split Dampo 1	2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	√		Sewa	APBD II
	51	Tempat Tidur	PK	2004	1	Buah	550.000	550.000	√		Sewa	APBD II
	52	Meja & Kursi	Prince	2004	1	Buah	550.000	550.000	√		Sewa	APBD II
	53	Meja Rias & Kursi		2004	1	Buah	325.000	325.000	√		Sewa	APBD II
	54	Lemari 4 pintu		2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	√		Sewa	APBD II
	55	Bantal & Guling		2004	4	Buah	55.000	220.000	√		Sewa	APBD II
	56	Kulkas	Uchida	2004	1	Buah	2.420.000	2.420.000	√		Sewa	APBD II
	57	Televisi	Sharp 21"	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	√		Sewa	APBD II
	58	Air Conditioner	Split Dampo 1	2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	√		Sewa	APBD II
	59	Tempat Tidur	PK	2004	1	Buah	550.000	550.000	√		Sewa	APBD II
	60	Meja Televisi	Prince	2004	1	Buah	245.000	245.000	√		Sewa	APBD II
	61	Meja Rias & Kursi		2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	√		Sewa	APBD II
	62	Lemari 2 Pintu		2004	1	Buah	285.000	285.000	√		Sewa	APBD II
	63	Bantal & Guling		2004	1	Buah	55.000	55.000	√		Sewa	APBD II
	64	Televisi	Sharp 21"	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	√		Sewa	APBD II
	65	Air Conditioner	Split Dampo 1	2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	√		Sewa	APBD II
	66	Tempat Tidur	PK	2004	1	Buah	425.000	425.000	√		Sewa	APBD II
	67	Meja Televisi	Prince	2004	1	Buah	245.000	245.000	√		Sewa	APBD II
	68	Meja Rias & Kursi		2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	√		Sewa	APBD II
	69	Lemari 2 Pintu		2004	1	Buah	285.000	285.000	√		Sewa	APBD II
	70	Bantal & Guling		2004	4	Buah	55.000	220.000	√		Sewa	APBD II
	71	Televisi	Sharp 21"	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	√		Sewa	APBD II
	72	Air Conditioner	Split Dampo 1	2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	√		Sewa	APBD II
	73	Tempat Tidur	PK	2004	1	Buah	425.000	425.000	√		Sewa	APBD II
	74	Meja Televisi	Prince	2004	1	Buah	245.000	245.000	√		Sewa	APBD II
	75	Meja Rias & Kursi		2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	√		Sewa	APBD II
	76	Lemari 2 Pintu		2004	1	Buah	285.000	285.000	√		Sewa	APBD II

Kode Rekr.	Kode Aset	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi	Status Kepemilikan	Ket.
	12 02 01 36			2004	4	Buah	55.000	220.000	√	Sewa	APBD II
77	Bantal & Guling		Split 1 PK Nasional								
78	Air Conditioner			2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	√	Sewa	APBD II
78	Sofa Tandu & Meja			2004	1	Buah	960.000	960.000	√	Sewa	APBD II
80	Dispenser		Myjako	2004	1	Buah	750.000	750.000	√	Sewa	APBD II
81	Galon Air			2004	5	Buah	50.000	250.000	√	Sewa	APBD II
82	Lemari			2004	1	Buah	320.000	320.000	√	Sewa	APBD II
83	Buku Melemari			2004	4	Buah	275.000	1.100.000	√	Sewa	APBD II
84	Jam Dinding			2004	1	Buah	125.000	125.000	√	Sewa	APBD II
85	Gelas			2004	36	Buah	8.000	288.000	√	Sewa	APBD II
86	Asbak			2004	1	Buah	25.000	25.000	√	Sewa	APBD II
87	Televisi		Sanyo 14" Sharp Tempo 1	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	√	Sewa	APBD II
88	Air Conditioner			2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	√	Sewa	APBD II
89	Meja Rias & Kursi			2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	√	Sewa	APBD II
90	Tempat Tidur			2004	2	Buah	425.000	850.000	√	Sewa	APBD II
91	Lemari 2 Pintu			2004	1	Buah	285.000	285.000	√	Sewa	APBD II
92	Bantal & Guling			2004	4	Buah	55.000	220.000	√	Sewa	APBD II
93	Meja Televisi			2004	1	Buah	245.000	245.000	√	Sewa	APBD II
94	Televisi		Sanyo 14"	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	√	Sewa	APBD II
95	Meja Rias & Kursi			2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	√	Sewa	APBD II
96	Tempat tidur			2004	1	Buah	425.000	425.000	√	Sewa	APBD II
97	Bantal & Guling			2004	4	Buah	55.000	220.000	√	Sewa	APBD II
98	Meja TV			2004	1	Buah	245.000	245.000	√	Sewa	APBD II
99	Televisi		Sanyo 14" Sharp Tempo 1	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	√	Sewa	APBD II
100	AC			2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	√	Sewa	APBD II
101	Meja Rias + Kursi			2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	√	Sewa	APBD II
102	Tempat Tidur			2004	4	Buah	425.000	1.700.000	√	Sewa	APBD II
103	Lemari 2 Pintu			2004	1	Buah	285.000	285.000	√	Sewa	APBD II
104	Bantal & Guling			2004	4	Buah	55.000	220.000	√	Sewa	APBD II
105	Meja TV			2004	1	Buah	245.000	245.000	√	Sewa	APBD II
106	Televisi		Sharp 21"	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	√	Sewa	APBD II
107	AC			2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	√	Sewa	APBD II
108	Meja Rias + Kursi			2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	√	Sewa	APBD II
109	Tempat Tidur			2004	2	Buah	425.000	850.000	√	Sewa	APBD II
110	Lemari 2 Pintu			2004	1	Buah	285.000	285.000	√	Sewa	APBD II

Kode Rek.	Kode Aset	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Ket.
									✓	✗		
111	Bantal & Guling											
112	Meja TV			2004	4	Buah	55.000	220.000	✓		Sewa	APBD II
113	Kulkas			2004	1	Buah	245.000	245.000	✓		Sewa	APBD II
114	Televisi		Uchida	2004	1	Buah	1.750.000	1.750.000	✓		Sewa	APBD II
115	AC		Sharp 21"	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	✓		Sewa	APBD II
116	Meja Rias + Kursi		Spill Dempo 1 PK	2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	✓		Sewa	APBD II
117	Tempat Tidur			2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	✓		Sewa	APBD II
118	Lemari 2 Pintu			2004	1	Buah	425.000	425.000	✓		Sewa	APBD II
119	Bantal & Guling			2004	1	Buah	285.000	285.000	✓		Sewa	APBD II
120	Meja TV			2004	4	Buah	55.000	220.000	✓		Sewa	APBD II
121	Kulkas			2004	1	Buah	245.000	245.000	✓		Sewa	APBD II
122	Televisi		Uchida	2004	1	Buah	1.750.000	1.750.000	✓		Sewa	APBD II
123	AC		Sharp 21"	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	✓		Sewa	APBD II
124	Meja Rias + Kursi		PK	2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	✓		Sewa	APBD II
125	Tempat Tidur			2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	✓		Sewa	APBD II
126	Lemari 2 Pintu			2004	1	Buah	425.000	425.000	✓		Sewa	APBD II
127	Bantal & Guling			2004	4	Buah	285.000	1.140.000	✓		Sewa	APBD II
128	Meja TV			2004	1	Buah	55.000	55.000	✓		Sewa	APBD II
129	Kulkas		Uchida	2004	1	Buah	245.000	245.000	✓		Sewa	APBD II
130	Televisi		Sanyo 14"	2004	1	Buah	1.750.000	1.750.000	✓		Sewa	APBD II
131	AC		Spill Dempo 1 PK	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	✓		Sewa	APBD II
132	Meja Rias + Kursi			2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	✓		Sewa	APBD II
133	Tempat Tidur			2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	✓		Sewa	APBD II
134	Lemari 2 Pintu			2004	3	Buah	425.000	1.275.000	✓		Sewa	APBD II
135	Bantal & Guling			2004	1	Buah	285.000	285.000	✓		Sewa	APBD II
136	Meja TV			2004	4	Buah	55.000	220.000	✓		Sewa	APBD II
137	Televisi		Sanyo 14"	2004	1	Buah	245.000	245.000	✓		Sewa	APBD II
138	AC		Spill Dempo 1 PK	2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	✓		Sewa	APBD II
139	Meja Rias + Kursi			2004	1	Buah	1.860.000	1.860.000	✓		Sewa	APBD II
140	Tempat Tidur			2004	1	Buah	1.354.000	1.354.000	✓		Sewa	APBD II
141	Lemari 2 Pintu			2004	2	Buah	425.000	850.000	✓		Sewa	APBD II
142	Bantal & Guling			2004	1	Buah	285.000	285.000	✓		Sewa	APBD II
143	Meja TV			2004	4	Buah	55.000	220.000	✓		Sewa	APBD II
144	Televisi		Sanyo 14"	2004	1	Buah	245.000	245.000	✓		Sewa	APBD II
				2004	1	Buah	1.250.000	1.250.000	✓		Sewa	APBD II

Kode Rekr.	Kode Aset	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Keperluan	Ket.
									■	□		
	145 AC		Split Dempo 1 PK	2004	1	Buah	1,890,000	1,890,000	✓		Selida	APBD II
	146 Meja Rias + Kursi			2004	1	Buah	1,364,000	1,364,000	✓		Selida	APBD II
	147 Tempat Tidur			2004	2	Buah	425,000	850,000	✓		Selida	APBD II
	148 Lemari 2 Pintu			2004	1	Buah	286,000	286,000	✓		Selida	APBD II
	149 Bantal & Guling			2004	4	Buah	56,000	220,000	✓		Selida	APBD II
	150 Meja TV			2004	1	Buah	245,000	245,000	✓		Selida	APBD II
	151 AC		Split 1 PK	2004	2	Buah	1,890,000	3,720,000	✓		Selida	APBD II
	152 Aebak		Stainless Steel	2004	1	Buah	15,000	15,000	✓		Selida	APBD II
	153 Jam Dinding				1	Buah	125,000	125,000	✓		Selida	APBD II
	156 Lemari mini				1	Buah	166,000	166,000	✓		Selida	APBD II
	156 Extra Bed		100 X 200 CM		2	Buah	230,000	460,000	✓		Selida	APBD II
	157 Lemari pakaian				1	Buah	215,000	215,000	✓		Selida	APBD II
	158 Meja Kerja Reception			2004	1	Buah	325,000	325,000	✓		Selida	APBD II
	159 Meja Kursi Bekas			2004	1	Buah	245,000	245,000	✓		Selida	APBD II
	160 Rak Buku			2004	1	Buah	225,000	225,000	✓		Selida	APBD II
	161 Kursi Kerja Reception			2004	1	Buah	175,000	175,000	✓		Selida	APBD II
	Jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga							488,790,100				
1 3	Alat Studio dan Alat Komunikasi											
1 4	Alat-Alat Kedokteran											
1 6	Alat Laboratorium											
1 6	Buku Perpustakaan											
1 7	Barang Berwujud Kebudayaan											
1 8	Hewan dan Ternak Serta Tanaman											
1 9	Alat-alat Pensejajaran/Kesamanan											
	Persediaan											

Name Satuan Kerja : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Kode Satuan Kerja :
 Alamat : Jl Jend. Sudirman Maros
 Telp :

Kode Rek.	Kode Aset	Lotusel	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Beban	Marga Setuah	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Ket.
									B	R/R/RB		
0 1	Tanah											
0 1 0 1	Pertambangan											
0 1 0 2	Tanah Pertanian											
0 1 0 3	TanahPerkebunan											
0 1 0 4	Kebun Campuran											
0 1 0 5	Hutan											
0 1 0 6	Kolam Ikan											
0 1 0 7	Danau/Rawa											
0 1 0 8	Tanah Tandus/Rusak											
0 1 0 9	Alang-alang dan Padang Rumpuk											
0 1 1 0	Tanah Pengguna Lahn											
0 1 1 1	Tanah untuk Bangunan Gedung											
0 1 1 2	Tanah Pertanian											
0 1 1 3	Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung											
0 2	Jalan dan Jembatan											
0 2 0 1	Jalan											
0 2 0 2	Jembatan											
0 3	Bangunan Air											
0 3 0 1	Bangunan Air Irigasi											
0 3 0 2	Bangunan Air Pasang Surut											
0 3 0 3	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Proder											
0 3 0 4	Bangunan Pengaturan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam											
0 3 0 5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah											
0 3 0 6	Bangunan Air Bersih											
0 3 0 7	Bangunan Air Kotor											
0 3 0 8	Bangunan Air Leut dan Air Tawar											
0 4	Instalasi											
0 4 0 1	Instalasi Air Minum/Berair											

Kode Rekr.	Kode Asst	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Beban	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Keperluan
									■	■	
0.4.0.2											
0.4.0.3											
0.4.0.4											
0.4.0.5											
0.4.0.6											
0.4.0.7											
0.4.0.8											
0.4.0.9											
0.5											
0.5.0.1											
0.5.0.2											
0.5.0.3											
0.5.0.4											
0.6											
0.6.0.1											
0.6.0.2											
0.6.0.3											
0.6.0.4											
0.6.0.5											
0.6.0.6											
0.6.0.7											
0.6.0.8											
0.7											
0.7.0.1											
0.7.0.2											
0.7.0.3											
0.7.0.4											
0.7.0.6											
0.7.0.6											
0.7.0.7											
0.7.0.8											
0.8											
0.8.0.1											
0.8.0.2											



Kode Nk.	Kode Asst	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Setuan	Harga Setuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan
									B	R/R/RB	
0 8 0 3		Alat-alat Bantu									
0 9		Alat Angkut									
0 9 0 1		Alat Angkutan Darat Bermotor									
0 9 0 2		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
0 9 0 3		Alat Angkut Apung Bermotor									
0 9 0 4		Alat Angkut Apung Tak Bermotor									
0 9 0 5		Alat Angkut Bermotor Udara									
1 0		Alat Bengkel Dan Alat Ukur									
1 0 0 1		Alat Bengkel Bermesin									
1 0 0 2		Alat Bengkel Tak Bermesin									
1 0 0 3		Alat ukur									
1 1		Alat Pertanian									
1 1 0 1		Alat Pengolahan									
1 1 0 2		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan									
1 2		Alat Kantor Dan Rumah Tangga									
1 2 0 1		Alat Kantor									
		Bag. Pemerintahan									
		1 Filing Kabinet	12 01 04 04	2002	1	Buah	1.000.000	1.000.000	√		Setida
		2 Filing Kabinet	12 01 04 05	2000	1	Buah	1.100.000	1.100.000	√		Setida
		3 Lemari Arsip	12 02 04 12	2000	2	Buah	325.000	650.000	√		Setida
		4 Kipas angin berdiri	12 02 04 06	2002	1	Buah	300.000	300.000	√		Setida
		5 Meja Penerima 0	12 04 01 05	1999	1	Buah	1.350.000	1.350.000	√		Setida
		6 Kursi Pimpinan	12 04 03 05	1996	1	Buah	900.000	900.000	√		Setida
		7 Kursi Pular Pakel Tangan	12 02 01 31	1996	2	Buah		500.000	√		Setida
		8 Meja Keeselon	12 04 01 06	2002	4	Buah		3.800.000	√		Setida
		9 Meja Staf	12 02 01 48	2001	4	Buah		2.800.000	√		Setida
		10 Meja Staf	12 02 01 48	2001	4	Buah		1.822.800	√		Setida
		11 Meja Staf	12 02 01 48	2001	1	Buah	700.000	700.000	√		Setida
		12 Kursi Staf (Merah)	12 02 01 31	2002	8	Buah		1.640.000	√		Setida
		13 Kursi Ukut	12 02 01 34	2003	4	Buah		980.000	√		Setida
		14 Kursi Tanpa Lengan	12 02 01 31	2002	1	Buah	350.000	350.000	√		Setida
		15 Scanner Foto	12 03 05 04	2003	1	Buah		2.350.000	√		Setida
1 2 0 2		Alat Rumah Tangga									
		Bag. Pemerintahan									

	Kode Asset	Locasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Isi (R/R) R/R	Status Keperluan
	1 Meja Panjang			12 02 01 19	1	Buah		340.000	✓	Saida
	2 Kursi + Meja Temu			12 02 01 28	1	Buah	2.550.000	2.550.000	✓	Saida
1 2 0 3	Komputer									
	Bag. Pemerintahan									
	1 Komputer			12 02 01 01	4	Set		7.800.000	✓	Saida
	Jumlah Aset Kantor dan Rumah Tangga							30.612.800		
1 3	Alat Studio dan Alat Komunikasi									
1 3 0 1	Alat Studio									
1 3 0 2	Alat Komunikasi									
1 3 0 3	Peralatan Pemancar									
1 4	Alat-Alat Kedokteran									
1 4 0 1	Alat Kedokteran									



(Sumber : Sub. Bagian Anggaran Sekda Kab. Maros)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Nama Satuan Kerja : Bag. Hukum Sekda Kab. Maros

Kode Satuan Kerja : 10012

Alamat : . . .

Telp : . . .

Kode Rel.	Kode Asal	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Batas Kemampuan	Ket.
									B	R/R (%)		
0 1		Tanah										
0 1 0 1		Perangsungan										
0 1 0 2		Tanah Perumahan										
0 1 0 3		Tanah/Perkebunan										
0 1 0 4		Kebun Campuran										
0 1 0 5		Hutan										
0 1 0 6		Kolek Ikan										
0 1 0 7		Danau/Rawa										
0 1 0 8		Tanah TanahRuwak										
0 1 0 9		Alang-alang dan Padang Rumpul										
0 1 1 0		Tanah Pertanian Lain										
0 1 1 1		Tanah untuk Bangunan Gedung										
0 1 1 2		Tanah Perimbangan										
0 1 1 3		Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung										
0 2		Jalan dan Jembatan										
0 2 0 1		Lain										
0 2 0 2		Jembatan										
0 3		Bangunan Air										
0 3 0 1		Bangunan Air Hujan										
0 3 0 2		Bangunan Air Palang Surut										
0 3 0 3		Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Polder										
0 3 0 4		Bangunan Pengembangan Sungai dan Paralel/pendaftan Bantaran Alam										
0 3 0 5		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah										
0 3 0 6		Bangunan Air Bekas										
0 3 0 7		Bangunan Air Kotor										
0 3 0 8		Bangunan Air Laut dan Air Tawar										
0 4		Instalasi										
0 4 0 1		Instalasi Air Minum/gerah										
0 4 0 2		Instalasi Air Kotor										
0 4 0 3		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik										

(Sumber : Sub. Bagian Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2009)

Kode Rea.	Kode Ases	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan
									B	R/R/ RD	
0 4 0 8		Instalasi Gas									
0 4 0 9		Instalasi Pengeraman									
0 5		Jaringan									
0 5 0 1		Jaringan Air Minum									
0 5 0 2		Jaringan Listrik									
0 5 0 3		Jaringan Telepon									
0 5 0 4		Jaringan Gas									
0 6		Bangunan Gedung									
0 6 0 1		Bangunan Gedung Tanggali Kediri									
		Kantor Bupati Kab. Maros			4 0 1 6	M2	824.000	3.309.184.000	√		
		Jumlah Bangunan Gedung						3.309.184.000			
0 7		Monumen									
0 7 0 1		Bangunan Bersejarah									
0 7 0 2		Tugu Peringatan									
0 7 0 3		Candi									
0 7 0 4		Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya									
0 7 0 5		Tugu Peringatan Lainnya									
0 7 0 6		Tugu Tilik Kontrol/Pasti									
0 7 0 7		Rambu-rambu									
0 7 0 8		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara									
0 8		Alat-Alat Besar									
0 8 0 1		Alat-Alat Besar Berat									
0 8 0 2		Alat-Alat Besar Ringan									
0 8 0 3		Alat-alat Sumbu									
0 9		Alat Angkut									
0 9 0 1		Alat Angkut Darat Bermotor									
0 9 0 2		Alat Angkut Darat Tak Bermotor									
0 9 0 3		Alat Angkut Airung Bermotor									
0 9 0 4		Alat Angkut Airung Tak Bermotor									
0 9 0 5		Alat Angkut Bermotor Udara									
		Jumlah Angkutan									

(Sumber : Sub Bagian Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2005)

Kode Ref.		Kode Ases	Label	Merk/Type	Tahun Pengadaan	Jumlah	Bahan	Harga Bahan	Total Harga	Kondisi	Saldo Keperluan	Kel.
										g / Rinc		
1 0	Akt Bersih dan Akt Ukur											
1 0 0 1	Akt Bersih Berman											
1 0 0 2	Akt Bersih Trk Berman											
1 0 0 3	Akt Ukur											
1 1	Akt Pertanian											
1 1 0 1	Akt Pertanian											
1 1 0 2	Akt Pemeliharaan Tanaman/Akt Pengiraman											
1 2	Akt Kantor Dan Rumah Tangga											
1 2 0 1	Akt Kantor											
	Bdg. Hukun Saida Mera											
	1. Telepon	13 02 01 11			2002	1	Buah	275.000	275.000	√	Saida	APBD II
	2. Rak arsip / Buset	12 01 04 03				2	Buah	289.000	578.000	√	Saida	APBD II
	3. Filing Kabinet	12 01 04 04			2002	1	Buah	1.000.000	1.000.000	√	Saida	APBD II
	4. Meja Pimpinan	12 04 01 05			1999	1	Buah	1.360.000	1.360.000	√	Saida	APBD II
	5. Kursi Pimpinan	12 04 03 05			1999	1	Buah	900.000	900.000	√	Saida	APBD II
	6. Meja Kesidang	12 04 02 06			1999	5	Buah	2.280.000	2.280.000	√	Saida	APBD II
	7. Meja Staf	12 02 01 11			2001	3	Buah	790.000	1.827.000	√	Saida	APBD II
	8. Kursi Kesidang	12 04 03 06			1999	3	Buah	1.827.000	1.827.000	√	Saida	APBD II
	9. Kursi staf (Mezan)	12 02 01 31			2002	9	Buah	1.640.000	1.640.000	√	Saida	APBD II
1 2 0 2	Akt Rumah Tangga											
	Bdg. Hukun Saida Mera											
	1. Meja + Kursi Tamu	12 02 01 28			2002	1	Buah	3.000.000	3.000.000	√	Saida	APBD II
	2. Kipas angin berdiri	12 02 04 06			2001	1	Buah	300.000	300.000	√	Saida	APBD II
1 2 0 3	Komputer											
	Bdg. Hukun Saida Mera											
	1. Komputer	13 02 01 01			2001	1	Sel	8.600.000	8.600.000	√	Saida	APBD II
1 3	Jumlah Akt Kantor Dan Rumah Tangga								23.510.000			
1 3 0 1	Akt Budo											
1 3 0 2	Akt Komunikasi											
1 3 0 3	Peralatan Pertanian											
1 4	Akt-Alat Kedokteran											
1 4 0 1	Akt Kesehatan											
1 4 0 2	Akt Kesehatan											
1 5	Akt Laboratorium											
1 5 0 1	Urbahan Laboratorium											

(Sumber : Sub. Bagian Anggaran Sekda Kab. Mera tahun 2005)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Nama Satuan Kerja : Bagian Personalia Sekretariat Daerah

Kode Satuan Kerja :

Alamat : Jl Jend. Sudirman Maros

Telp :

Kode Mah.	Kode Aset	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi	Status Kepemilikan	Ket.
									■ R/ ■ N/ ■ B/		
0 1		Tanah									
0 2		Jalan dan Jembatan									
0 3		Bangunan Air									
0 4		Instalasi									
0 5		Jaringan									
0 6		Bangunan Gedung									
0 7		Morumen									
0 8		Alat-Alat Besar									
0 9		Alat Angkut									
1 0		Alat Bangkal Dan Alat Ukur									
1 1		Alat Peranlan									
1 2		Alat Kantor Dan Rumah Tangga									
1 2 0 1		Alat Kantor									
		Bag. Ekonomi Saka									
		1 Filing Kabinet		2002	1	Buah	1.000.000	1.000.000	√		Sewa APBD II
		2 Lemari Arloji		2002	1	Buah	275.000	275.000	√		Sewa APBD II
		3 Meja Kalk		2001	1	Buah	1.500.000	1.500.000	√		Sewa APBD II

(Sumber : Sub Bagian Anggaran Sekda Kab Maros Tahun 200)

	4 Komputer + Printer	12 03 01 01				2001	1	Sat	7.500.000	7.500.000	√		Satda	APBD II
	5 Meja Penerimaan	12 04 01 06				1999	1	Buah	1.350.000	1.350.000	√		Satda	APBD II
	6 Kursi Penerimaan	12 04 03 05				1999	1	Buah	900.000	900.000	√		Satda	APBD II
	7 Meja Kasubag	12 04 02 08				1999	1	Buah	450.000	450.000	√		Satda	APBD II
	8 Meja Kasubag	12 04 02 09				1999	2	Buah	500.000	500.000	√		Satda	APBD II
	9 Meja Tulis	12 02 01 11				2001	2	Buah	1.215.000	1.215.000	√		Satda	APBD II
	10 Kursi Penerimaan Lengan	12 04 03 08				1999	3	Buah	750.000	750.000	√		Satda	APBD II
	11 Kursi Staf Marsh	12 02 01 31				2002	8	Buah	1.640.000	1.640.000	√		Satda	APBD II
	12 Meja Tulis	12 02 01 11					2	Buah	250.000	500.000	√		Satda	APBD II
	13 Yntke Board	12 01 06 10					2	Buah	188.000	376.000	√		Satda	APBD II
	14 Kursi Meja Tamu	12 02 01 28					1	Buah	2.500.000	2.500.000	√		Satda	APBD II
	Jumlah Alet Kantor Dan Rumah Tinggi								20.440.000					
1 3	Alet Studio dan Alet Komunikasi													
1 4	Alet-Alet Kedokteran													
1 5	Alet Laboratorium													
1 6	Buku Perpustakaan													
1 7	Barang Bererek Kebudayaan													
1 8	Hewan dan Ternak Serta Tanaman													
1 9	Alet-alat Perencanaan/Kemaman													
	Perediaan													
2 0	Barang Perediaan dan Barang Pakai Kabis													

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Nama Satuan Kerja : Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

Kode Satuan Kerja :

Alamat : Jl Jend. Sudirman Maros

Telp :

Kode Rekr.	Kode Aset	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Ket.
									B	R/R/KB		
0 1		Tanah										
0 2		Jalan dan Jembatan										
0 3		Bangunan Air										
0 4		Instalasi										
0 5		Jaringan										
0 6		Bangunan Gedung										
0 7		Monumen										
0 8		Alat-Alat Besar										
0 9		Alat Angkut										
1 0		Alat Bengkel Dan Alat Ukur										
1 1		Alat Pertanian										
1 2		Alat Kantor Dan Rumah Tangga										
1 2 0 1		Alat Kantor										
		Bag. Pembangunan Sekda										
		1 Lemari Arsip	12 02 04 03	2002	5	Buah	360.000	1.760.000	√		Sekda	APBD II
		2 Meja Kerja	12 01 01 09	2002	1	Buah	1.450.000	1.450.000	√		Sekda	APBD II
		3 Calculator Printing	12 01 01 01	2002	1	Buah	1.400.000	1.400.000	√		Sekda	APBD II

(Sumber : Sub. Bag. Anggaran Sekda Kab. Maros Tahun 2005)

Kode Rekr.		Kode Aseer	Lokasi	Merku/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi	Status Kepemilikan	Ket.
										g	RI	RI
	9 Meja Pimpinan	12.04.01.05			1999	2	Buah	1.350.000	1.350.000	√	Sewa	APBD II
	10 Kursi Pimpinan	12.04.03.05			1999	1	Buah	900.000	900.000	√	Sewa	APBD II
	11 Kursi Kasubag	12.04.03.06			2002	3	Buah	850.000	2.550.000	√	Sewa	APBD II
	12 Meja Kasubag	12.04.02.06			2002	3	Buah	1.650.000	4.950.000	√	Sewa	APBD II
	13 Kursi Staf	12.02.01.03			2002	6	Buah	600.000	3.600.000	√	Sewa	APBD II
	14 Meja Staf	12.02.01.48			2002	6	Buah	1.200.000	7.200.000	√	Sewa	APBD II
	15 Meja Rapat	12.02.01.10			2002	1	Buah	2.750.000	2.750.000	√	Sewa	APBD II
	16 Meja Staf	12.01.01.11			2001	2	Buah	607.500	1.215.000	√	Sewa	APBD II
	17 Kursi Rapat	12.02.01.27			2002	6	Buah	650.000	3.900.000	√	Sewa	APBD II
	18 Kursi Puar Pakel Lengen	12.04.03.05			2002	3	Buah	250.000	750.000	√	Sewa	APBD II
	19 Kursi Staf (Merah)	12.02.01.03			2002	12	Buah	205.000	2.460.000	√	Sewa	APBD II
	22 Ponsel Telepon	13.02.01.11			2002	1	Buah	175.000	175.000	√	Sewa	APBD II
	23 Meja + kursi Tamu	12.02.01.28			2002	1	Buah	3.000.000	3.000.000	√		
1 2 0 2	Alat Rumah Tangga											
	1 Bunga + Pot				2002	1	Buah	900.000	900.000	√	Sewa	APBD II
	2 Dipenser				2002	1	Buah	750.000	750.000	√		
	3 Bupet + Meja Kecil					2	Buah	350.000	700.000	√	Sewa	APBD II
1 3	Jumlah Alat Kantor Dan Rumah Tangga								101.750.000			
1 3	Alat Studio dan Alat Komunikasi											
1 4	Alat-Alat Kedokteran											
1 5	Alat Laboratorium											
1 6	Buku Perputakaan											
1 7	Barang Bercorak Kebudayaan											
1 8	Hewan dan Ternak Serta Tanaman											
1 9	Alat-alat Peralatan/Keamanan											

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Nama Satuan Kerja : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kode Satuan Kerja :

Alamat :

Telp :

Kode Rek.	Kode Asest	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Setuan	Harga Setuan	Total Harga	Kondisi <input type="checkbox"/> RQ <input type="checkbox"/> RQ	Status Kepemilikan	Ket.
0 1		Tanah									
0 2		Jalan dan Jembatan									
0 3		Bangunan Air									
0 4		Instalasi									
0 5		Jaringan									
0 6		Bangunan Gedung									
0 7		Monumen									
0 8		Alat-Alat Besar									
0 9		Alat Angkut									
1 0		Alat Bangkel Dan Alat Ukur									
1 1		Alat Pertanian									

(Sumber : Sub. Bag. Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2009)

Kode Rekr.	Kode Aset	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Keperluan	Ket.
									B	RN/RB		
1 2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga											
1 2 0 1	Alat Kantor											
	1 Meja Pimpinan			1999	1	Buah	1.350.000	√		Satwa	APBD II	
	2 Kursi Pimpinan			1999	1	Buah	900.000	√		Satwa	APBD II	
	3 Meja Staf			1999	3	Buah	1.350.000	√		Satwa	APBD II	
	4 Meja Staf			1999	4	Buah	1.800.000	√		Satwa	APBD II	
	5 Meja Kasubag			1999	1	Buah	1.350.000	√		Satwa	APBD II	
	6 Meja Staf			2001	1	Buah	907.500	√		Satwa	APBD II	
	7 Kursi Puder			1999	4	Buah	1.000.000	√		Satwa	APBD II	
	8 Kursi Staf			2002	7	Buah	1.435.000	√		Satwa	APBD II	
	9 Kursi Staf			2002	2	Buah	850.000	√		Satwa	APBD II	
	10 Meja Komputer				1	Buah	270.000	√		Satwa	APBD II	
	11 Filings Kabinet				2	Buah	1.000.000	√		Satwa	APBD II	
	12 Filings Kabinet			2002	1	Buah	1.000.000	√		Satwa	APBD II	
	13 Lemari Arap			2002	1	Buah	1.850.000	√		Satwa	APBD II	
	14 Rak Arap			1999	2	Buah	3.000.000	√		Satwa	APBD II	
	15 Meah kecil			1998	1	Buah	1.450.000	√		Satwa	APBD II	
	16 Telepon			2002	1	Buah	275.000	√		Satwa	APBD II	
	17 Nota Book P. III			2001	1	Buah	25.128.000	√		Satwa	APBD II	
	18 Komputer			2001	1	Sat	9.750.000	√		Satwa	APBD II	
1 2 0 2	Alat Rumah Tangga											
	1 Meja & Kursi Tamu			2000	1	Buah	2.652.000	√		Satwa	APBD II	
	2 Kipas Angin berdiri			2002	1	Buah	300.000	√				
	Jumlah Alat Kantor dan rumah tangga						97.217.900					
1 3	Alat Studio dan Alat Komunikasi											
1 4	Alat-Alat Kedokteran											
1 5	Alat Laboratorium											
1 6	Buku Perpustakaan											
1 7	Barang Beracrak Kebudayaan											

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

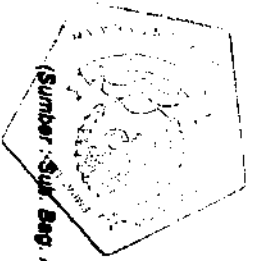
Nama Satuan Kerja : Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kode Satuan Kerja :

Alamat :

Telp :

Kode Rek.	Kode Aset	Lotus	Mark/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi	Status	Ket.
									□ RUP □ RIB	Keperluan	
0 1	Tanah										
0 2	Jalan dan Jembatan										
0 3	Bangunan Air										
0 4	Instalasi										
0 5	Jaringan										
0 6	Bangunan Gedung										
0 7	Monumen										
0 8	Alat-Alat Besar										
0 9	Alat Angkut										
1 0	Alat Bengkel Dan Alat Ukur										
1 1	Alat Pertanian										



(Sumber: Survei Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2006)

Kode Rek.		Kode Aset	Lokeal	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi	Status Keperluan	Ket.
										B R/R R/S		
1 2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga											
1 2 0 1	Alat Kantor											
	1 Telepon	13 02 01 11			2002	1	Buah	607.500	607.500	√	Saida	APBD II
	2 Telepon	13 02 01 11			2002	1	Buah	275.000	275.000	√	Saida	APBD II
	3 Meja Pimpinan	12 04 01 06			1999	1	Buah	1.350.000	1.350.000	√	Saida	APBD II
	4 Kursi Pimpinan	12 04 03 06			1999	1	Buah	900.000	900.000	√	Saida	APBD II
	5 Meja Kaosbang	12 04 02 05			1999	1	Buah	1.350.000	1.350.000	√	Saida	APBD II
	6 Kursi Kaosbang	12 04 03 06			1999	1	Buah	280.000	280.000	√	Saida	APBD II
	7 Kursi Staf (Marah)	12 02 01 31			2002	2	Buah	410.000	410.000	√	Saida	APBD II
	8 Kursi Staf (Abu-abu)	12 02 01 31			2002	7	Buah	2.450.000	2.450.000	√	Saida	APBD II
	9 Meja palak laci	12 01 04 03				1	Buah	275.000	275.000	√	Saida	APBD II
	10 Meja Kaosbang	12 04 02 05			1999	1	Buah	450.000	450.000	√	Saida	APBD II
	11 Kursi Kaosbang	12 04 03 06			1999	1	Buah	900.000	900.000	√	Saida	APBD II
	12 Kursi Kaosbang	12 04 03 06			1999	1	Buah	250.000	250.000	√	Saida	APBD II
	13 Meja Staf	12 02 01 48			1999	2	Buah	900.000	900.000	√	Saida	APBD II
	14 Meja Staf	12 02 01 48			2002	2	Buah	410.000	410.000	√	Saida	APBD II
	15 Meja Staf	12 02 01 48			2003	1	Buah	700.000	700.000	√	Saida	APBD II
	16 Meja Staf	12 02 01 48			2001	4	Buah	2.430.000	2.430.000	√	Saida	APBD II
	17 Kursi Pudar Pakal Lengan	12 02 01 30			1999	4	Buah	1.000.000	1.000.000	√	Saida	APBD II
	18 Kursi Staf (Marah)	12 02 01 31			2002	14	Buah	2.870.000	2.870.000	√	Saida	APBD II
	19 Kursi Staf (Hiam)	12 02 01 34			2004	2	Buah	300.000	300.000	√	Saida	APBD II
	20 Komputer + Printer	12 03 01 01			2003	1	Sel	17.250.000	17.250.000	√	Saida	APBD II
	21 Filing Kabinet	12 01 04 04			2002	1	Buah	1.000.000	1.000.000	√	Saida	APBD II
	22 Lemari Arsip	12 01 04 01			2002	1	Buah	1.850.000	1.850.000	√	Saida	APBD II
	23 Lemari Arsip	12 01 04 01			2000	1	Buah	900.000	900.000	√	Saida	APBD II
	24 Filing Kabinet	12 01 04 04			2002	2	Buah	2.000.000	2.000.000	√	Saida	APBD II
	26 Filing Kabinet	12 01 04 04			1999	2	Buah	1.100.000	1.100.000	√	Saida	APBD II
	28 Lemari Arsip VIP	12 01 04 01			2002	1	Buah	1.650.000	1.650.000	√	Saida	APBD II
	27 Lemari Arsip	12 01 04 01			2001	1	Buah	1.340.000	1.340.000	√	Saida	APBD II
	28 Lemari Serek	12 01 04 11			2001	1	Buah	310.000	310.000	√	Saida	APBD II
	29 Komputer	12 03 01 01			2001	1	Sel	7.400.000	7.400.000	√	Saida	APBD II
	30 Komputer	12 03 01 01			2001	1	Sel	7.000.000	7.000.000	√	Saida	APBD II

(Sumber : Sub. Bag. Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2005)

Kode Rek.	Alat Rumah Tangga	Kode Asst	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Setoran	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Ker.
										B	R/R/RB		
1 2 0 2	1 Buper	12 01 04 03			1999	1	Buah	650.000	650.000	√		Setda	APBD II
	2 Bunga + Pot	12 02 01 51			2002	1	Buah	900.000	900.000	√		Setda	APBD II
	3 Kipas angin berhad	12 02 04 09			2003	1	Buah	600.000	600.000	√		Setda	APBD II
	4 Jam Dinding	12 02 02 01			2002	1	Buah	75.000	75.000	√		Setda	APBD II
	5 Meja Tamu	12 04 01 11			2002	1	Buah	700.000	700.000	√		Setda	APBD II
1 3	Jumlah Alat Kantor dan rumah tangga								62.802.500				
	Alat Studio dan Alat Komunikasi												
1 4	Alat-Alat Kedokteran												
1 6	Alat Laboratorium												
1 6	Buku Perpustakaan												
1 7	Barang Bercorak Kebudayaan												
1 8	Hewan dan Ternak Serta Tanaman												
1 9	Alat-alat Peralatan/Kemampuan												
	Perediaan												
2 0	Barang Perediaan dan Barang Pakai Habis												

(Sumber : Sub. Bag. Anggaran Sekda Kab. Merauh tahun 2005)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Nama Satuan Kerja : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Kode Satuan Kerja :

Alamat :

Telp :

Kode Rek.	Kode Aset	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Ket.
									■	□		
0 1	Tanah											
0 2	Jalan dan Jambatan											
0 3	Bangunan Air											
0 4	Infrastruktur											
0 5	Jembatan											
0 6	Bangunan Gedung											
0 7	Monumen											
0 8	Alat-Alat Besar											
0 9	Alat Angkut											
1 0	Alat Bangkut Dan Alat Urut											
1 1	Alat Pertanian											
1 2	Alat Kantor Dan Rumah Tinggal											
1 2 0 1	Alat Kantor											
	Bagian Keuangan Sekda											
	1 FIKRO Kabinet	12 01 04 04		2002	3	Buah		1.000.000	Y		Sekda	APBD II
	2 Budget	12 01 04 03		2002	1	Buah		1.000.000	Y		Sekda	APBD II

(Sumber : Sub. Bag. Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2006)

Kode Rekr.	Kode Aspek	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi	Batas Keperluan	Ket.
	3 Lemari Arap			2000	2	Buah		850.000	✓	Setda	APBD II
	4 Brankas			2001	1	Buah			✓	Setda	APBD II
	6 Filing Kabinet			1999	1	Buah	1.100.000	1.100.000	✓	Setda	APBD II
	6 Rak Arap			2000	1	Buah	800.000	800.000	✓	Setda	APBD II
	7 Brankas			2000	1	Buah			✓	Setda	APBD II
	8 Televisi			2000	1	Buah		950.000	✓	Setda	APBD II
	9 Kipas angin berisik			2001	1	Buah		9.500.000	✓	Setda	APBD II
	10 Komputer			2003	2	Set			✓	Setda	APBD II
	11 Komputer			1999	1	Buah	1.350.000	1.350.000	✓	Setda	APBD II
	12 Meja Pimpinan			1999	1	Buah	900.000	900.000	✓	Setda	APBD II
	13 Kursi Pimpinan			2001	2	Buah	907.500	1.215.000	✓	Setda	APBD II
	14 Meja Staf		Victor	1999	2	Buah	450.000	900.000	✓	Setda	APBD II
	15 Meja Staf			2001	1	Buah	607.500	607.500	✓	Setda	APBD II
	16 Meja Telepon			2002	4	Buah	208.000	820.000	✓	Setda	APBD II
	17 Kursi staf (Merah)			2003	2	Buah	250.000	500.000	✓	Setda	APBD II
	18 Kursi Pular Tangan Lengan			2003	1	Buah	250.000	250.000	✓	Setda	APBD II
	20 Meja Komputer			2002	1	Buah	275.000	275.000	✓	Setda	APBD II
	21 Telepon			2002	2	Buah	275.000	275.000	✓	Setda	APBD II
	22 Telepon			2002	2	Buah	275.000	275.000	✓	Setda	APBD II
	Sub bagian yankesai										
	1 Lemari arap			1999	4	Buah	1.800.000	1.800.000	✓	Setda	APBD II
	2 Lemari Strok			2001	4	Buah	2.450.000	1.800.000	✓	Setda	APBD II
	3 Meah Ketik			2002	1	Buah	450.000	450.000	✓	Setda	APBD II
	4 Komputer			2003	1	Set	13.480.000	13.480.000	✓	Setda	APBD II
	5 Komputer			2003	1	Set	1.350.000	1.350.000	✓	Setda	APBD II
	6 Meja Kerasbag			1999	4	Buah	1.800.000	1.800.000	✓	Setda	APBD II
	7 Meja Staf			2001	4	Buah	2.450.000	1.800.000	✓	Setda	APBD II
	8 Meja Staf			2002	2	Buah	250.000	500.000	✓	Setda	APBD II
	9 Meja Staf			2002	1	Buah	550.000	550.000	✓	Setda	APBD II
	10 Meja Staf			2002	2	Buah	550.000	1.100.000	✓	Setda	APBD II
	11 Meja Staf			2003	1	Buah	350.000	350.000	✓	Setda	APBD II
	12 Meja Staf			2003	2	Buah	350.000	350.000	✓	Setda	APBD II
	13 Kursi Kasubag			2003	1	Buah	350.000	350.000	✓	Setda	APBD II

(Sumber : Sub Bag Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2009)

Kode Rek.	Kode Aset	Lokasi	Meriv Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi	Bentuk Kepemilikan	Ket.
									g Rf Rf		
14 Kurul Staf	12 02 01 31		Future	2002	10	Buah	200.000	2.000.000	√	Serda	APBD II
19 Kurul Staf	12 02 01 31				2	Buah		450.000	√	Serda	APBD II
16 Rak Gantung terbuka 6 W	12 02 01 02			2005	1	Buah	3.600.000	3.600.000	√	Serda	APBD II
Subag Perencanaan											
1 Measn Kelik	12 01 01 01			2002	2	Buah		3.000.000	√	Serda	APBD II
2 Measn Kelik	12 01 01 01			1999	1	Buah		6.400.000	√	Serda	APBD II
3 Measn Kelik	12 01 01 01			2001	1	Buah		895.000	√	Serda	APBD II
4 Measn Kelik	12 01 01 01				1	Buah		2.050.000	√	Serda	APBD II
5 Filling Kabinet	12 01 04 04				1	Buah		389.000	√	Serda	APBD II
6 Filling Kabinet	12 01 04 04				1	Buah		389.000	√	Serda	APBD II
7 Lemari Arap	12 01 04 04				1	Buah		475.000	√	Serda	APBD II
8 Lemari Arap	12 01 04 04				1	Buah		475.000	√	Serda	APBD II
9 U P S	12 01 04 04			2004	1	Buah		475.000	√	Serda	APBD II
10 Meja Kaabang	12 04 02 08				1	Set		750.000	√	Serda	APBD II
11 Meja Staf	12 02 01 04			2003	1	Buah	1.350.000	1.350.000	√	Serda	APBD II
12 Meja Staf	12 02 01 48				5	Buah	250.000	1.250.000	√	Serda	APBD II
13 Meja Staf	12 02 01 48	Victor		2001	8	Buah	250.000	2.000.000	√	Serda	APBD II
14 Meja Staf	12 02 01 48			1999	2	Buah		1.215.000	√	Serda	APBD II
15 Kurul Staf	12 02 01 29				1	Buah	210.000	210.000	√	Serda	APBD II
16 Kurul Staf	12 02 01 31	Future		2002	11	Buah		2.285.000	√	Serda	APBD II
17 Kurul Staf (Abu-abu)	12 02 01 31				4	Buah		2.285.000	√	Serda	APBD II
18 Kurul Kaabang	12 04 03 07			2003	1	Buah		350.000	√	Serda	APBD II
Subag Pembinaan											
1 Filling Kabinet	12 01 04 04				1	Buah		250.000	√	Serda	APBD II
2 Filling Kabinet	12 01 04 04				1	Buah		250.000	√	Serda	APBD II
3 Rak Arap	12 01 04 03				1	Buah		320.000	√	Serda	APBD II
4 Lemari Arap	12 02 01 54			2000	1	Buah		650.000	√	Serda	APBD II
5 Measn Kelik	12 01 01 01			2002	1	Buah		2.700.000	√	Serda	APBD II
6 Kipas angin berdiri	12 02 04 06				1	Buah		300.000	√	Serda	APBD II
7 Komputer	12 03 01 01			2002	2	Set		14.250.000	√	Serda	APBD II
8 Meja Kaabang	12 04 02 08			2003	1	Buah		1.350.000	√	Serda	APBD II
9 Meja Staf pelak kaca	12 02 01 48			2003	1	Buah		900.000	√	Serda	APBD II
10 Meja staf biro	12 02 01 48			1999	2	Buah		900.000	√	Serda	APBD II
11 Meja staf	12 02 01 48				9	Buah	210.000	1.890.000	√	Serda	APBD II

(Sumber : Sub. Bag Anggaran Sekda Kab. Marcos tahun 2005)

Kode Rekr.	Kode Aset	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kendali	Status Kepemilikan	Ket.
	12 Meja Staf		Victor	2001	3	Buah		1.822.500	✓	Setida	APBD II
	13 Meja komputer			2002	2	Buah	185.000	370.000	✓	Setida	APBD II
	14 Kursi Putar			1999	1	Buah		250.000	✓	Setida	APBD II
	15 Kursi Staf		Futura	2002	15	Buah		3.075.000	✓	Setida	APBD II
	16 Kursi putar			2003	2	Buah		450.000	✓	Setida	APBD II
	17 Meja				1	Buah		242.000	✓	Setida	APBD II
	18 Rak Gantung terbuka 12 M			2005	1	Buah	9.360.000	9.360.000	✓	Setida	APBD II
	Sub Bagian Anggaran										
	1 Meja & Kursi Tamu				1	Buah		425.000	✓	Setida	APBD II
	2 Komputer			1996	1	Set		15.000.000	✓	Setida	APBD II
	3 Komputer			2003	1	Set		15.000.000	✓	Setida	APBD II
	4 Komputer			2002	1	Set		11.500.000	✓	Setida	APBD II
	5 Komputer			2004	1	Set		7.500.000	✓	Setida	APBD II
	6 Meja Kesibng			2003	1	Buah		1.350.000	✓	Setida	APBD II
	7 Meja Staf			1999	1	Buah		450.000	✓	Setida	APBD II
	8 Meja Staf pakat kaca			2003	1	Buah		900.000	✓	Setida	APBD II
	8 Meja Staf			1999	2	Buah		450.000	✓	Setida	APBD II
	10 Meja Staf			2001	1	Buah		607.500	✓	Setida	APBD II
	11 Kursi Staf			2002	5	Buah		1.025.000	✓	Setida	APBD II
	12 Kursi Lipat				1	Buah		125.000	✓	Setida	APBD II
	13 Kursi Putar Pakat Lengan			1999	1	Buah		250.000	✓	Setida	APBD II
	Jumlah Alet Kantor dan Rumah Tinggal							189.487.500			
1 3	Alat Studio dan Alat Komunikasi										
1 4	Alat-Alat Kedokteran										
1 5	Alat Laboratorium										
1 6	Buku Perpustakaan										
1 7	Barang Barcorak Kebudayaan										
1 8	Hewan dan Ternak Serta Tanaman										

(Sumber : Sub. Bag. Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2005)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

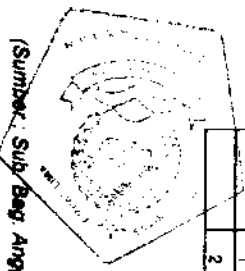
Nama Setuan Kerja : Bagian Humas Sekretariat Daerah

Kode Setuan Kerja :

Alamat :

Telp :

Kode Res.	Kode Aset	Lokasi	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Setuan	Harga Setuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Ket.
									0	1		
0 1		Tanah										
0 2		Jalan dan Jembatan										
0 3		Bangunan Air										
0 4		Instalasi										
0 5		Jaringan										
0 6		Bangunan Gedung										
0 7		Monumen										
0 8		Alat-Alat Besar										
0 9		Alat Angkut										
1 0		Alat Bangkai Dan Alat Ukur										
1 1		Alat Pertanian										
1 2		Alat Kantor Dan Rumah Tangga										
1 2 0 1		Alat Kantor										
		Bdg. Humas Seida										
		1. Telepon	13.02.01.11	2002	1	Buah		275.000	√		Selida	APBD II
		2. Telepon. Fax	13.02.01.11	2001	2	Buah		1.750.000	√		Selida	APBD II



(Sumber: Sub-Bag Anggaran Sekda Kab. Marostahun 2005)

Kode Rek.	Kode Aset	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi	Batas Kapemilikan	Ket.
									0	R/R	R/S
	3 Pesawat SSB				2		5.500.000	11.000.000			
	4 Power SSB				2			421.000			
	5 Kursi + Meja Tamu				1	Buah		1.250.000	√	Saida	APBD II
	6 Meja Penerimaan			1988	1	Buah		1.350.000	√	Saida	APBD II
	7 Kursi Penerimaan			1988	1	Buah		800.000	√	Saida	APBD II
	8 Meja Rapat Sewi Empoat			2002	1	Buah		5.000.000	√	Saida	APBD II
	9 Meja Panjang				2	Buah	320.000	640.000	√	Saida	APBD II
	10 Meja Karubag			1988	1	Buah		1.350.000	√	Saida	APBD II
	11 Meja Karubag			1988	1	Buah		450.000	√	Saida	APBD II
	12 Meja Staf			2001	3	Buah		1.822.000	√	Saida	APBD II
	13 Meja Staf				1	Buah		350.000	√	Saida	APBD II
	14 Meja Komputer				1	Buah		185.000	√	Saida	APBD II
	15 Kursi Pular			1988	2	Buah		500.000	√	Saida	APBD II
	16 Kursi Pular			1988	1	Buah		900.000	√	Saida	APBD II
	17 Kursi Staf			2002	5	Buah		1.025.000	√	Saida	APBD II
	18 Kursi Rapat (Abu-Abu)			2002	5	Buah		1.750.000	√	Saida	APBD II
	19 Meja Staf				1	Buah		350.000	√	Saida	APBD II
	20 Meja Staf				4	Buah	350.000	1.400.000	√	Saida	APBD II
	21 Meja Panjang				3	Buah	275.000	825.000	√	Saida	APBD II
	22 Kursi Pular			1988	4	Buah		1.000.000	√	Saida	APBD II
	23 Kursi Staf			2002	4	Buah		820.000	√	Saida	APBD II
	24 Kursi Lipat				2	Buah	65.000	190.000	√	Saida	APBD II
	25 Kursi Rapat (Abu-Abu)			2002	2	Buah		700.000	√	Saida	APBD II
	26 Gantungan Koran				1	Buah		85.000	√	Saida	APBD II
	27 Kipas angin berdin			2000	1	Buah		300.000	√	Saida	APBD II
	28 Air Conditioner				1	Buah		2.550.000	√	Saida	APBD II
	29 Kipas angin				1	Buah		32.000	√	Saida	APBD II
	30 Filling Kabinet			2002	1	Buah		1.000.000	√	Saida	APBD II
	31 Lemari Arap				2	Buah		842.000	√	Saida	APBD II
	32 Lemari Arap				1	Buah	421.000	421.000	√	Saida	APBD II
	33 Meja Keik				2	Buah	420.000	840.000	√	Saida	APBD II
	Jumlah Alat Kantor Dan Rumah Tangga							42.373.000			
1 3	Alat Studio dan Alat Komunikasi										

(Sumber : Sub. Bag. Anggaran Sekda Kab. Mawasahun 2005)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Nama Satuan Kerja : Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

Kode Satuan Kerja :

Alamat :

Telp :

Kode Rek.	Kode Aset	Lokasi	Merlu Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepertilikan	Ket.
									B	R/R/RS		
0 1		Tanah										
0 2		Jalan dan Jembatan										
0 3		Bangunan Air										
0 4		Instalasi										
0 5		Jaringan										
0 6		Bangunan Gedung										
0 7		Monumen										
0 8		Alat-Alat Besar										
0 9		Alat Angkut										
1 0		Alat Bengkel Dan Alat Ukur										
1 1		Alat Pertanian										
1 2		Alat Kantor Dan Rumah Tangga										
1 2 0 1		Alat Kantor										
		Bag. Pemerintahan Desa & Kel. Sekda										
		1 Filing Kabinet	12 01 04 04	2002	1	Buah	1.000.000	1.000.000	v		Sekda	APBD II

(Sumber : Sub Bag. Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2005)

Kode Rak		Kode Aset	Lokasi	Meru Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi B	R/R	R/B	Status Kepemilikan	Ket.
	2 Meja Kecil	12 01 01 08			2001	1	Buah	1.500.000	1.500.000	√			Saida	APBD II
	3 Lemari Sorek	12 01 04 11				1	Buah	310.000	310.000	√			Saida	APBD II
	4 Meja & Kursi Tamu	12 02 01 26			2002	1	Buah	1.300.000	1.300.000	√			Saida	APBD II
	5 Kipas angin berdiri	12 02 04 06			2001	1	Buah	300.000	300.000	√			Saida	APBD II
	6 Komputer	12 03 01 01			2004	1	Set	8.750.000	8.750.000	√			Saida	APBD II
	7 Komputer	12 03 01 01			2001	1	Set	7.400.000	7.400.000	√			Saida	APBD II
	8 Meja Pimpinan	12 04 01 05			1999	1	Buah	1.350.000	1.350.000	√			Saida	APBD II
	9 Kursi Pimpinan	12 04 03 05			1999	1	Buah	900.000	900.000	√			Saida	APBD II
	10 Meja Ksubag	12 04 02 06			1989	4	Buah	1.800.000	1.800.000	√			Saida	APBD II
	11 Meja Staf	12 02 01 11			2001	3	Buah	1.822.500	1.822.500	√			Saida	APBD II
	12 Kursi Pukul Pakel Lengan	12 02 01 30			1999	4	Buah	1.000.000	1.000.000	√			Saida	APBD II
	13 Kursi Staf	12 02 01 31			2002	6	Buah	1.230.000	1.230.000	√			Saida	APBD II
	Jumlah Alat Kantor Dan Rumah Tangga								28.882.500					
1 3	Alat Studio dan Alat Komunikasi													
1 4	Alat-Alat Kedokteran													
1 5	Alat Laboratorium													
1 6	Buku Perpustakaan													
1 7	Barang Bercorak Kebudayaan													
1 8	Hewan dan Ternak Serta Tamanan													
1 9	Alat-alat Persenjataan/Kamaman													
	Persediaan													
2 0	Barang Persediaan dan Barang Pakai Hablis													

(Sumber : Sub. Beg. Anggaran Sekda Kab. Marcos tahun 2005)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Nama Satuan Kerja : Bagian Sosial Sekretariat Daerah

Kode Satuan Kerja :

Alamat :

Telp :

Kode Rekr.	Kode Ases	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Kst.
									B	R/R/ RB		
0 1		Tanah										
0 2		Jalan dan Jembatan										
0 3		Bangunan Air										
0 4		Instalasi										
0 5		Jaringan										
0 6		Bangunan Gedung										
0 7		Monumen										
0 8		Alat-Alat Besar										
0 9		Alat Angkut										
1 0		Alat Bengkap Dan Alat Ukur										
1 1		Alat Perantian										
1 2		Alat Kantor Dan Rumah Tangga										
1 2 0 1		Alat Kantor										
		Bag Sosial Sekda Maros										
		1 Filing Kabinet	12 01 04 04	2002	1	Buah	1.000.000	1.000.000	√		Sewa	APBD II

(Sumber : Sub. Bag. Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2005)

Kode Rekr.	Kode Aset	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kondisi		Status Kepemilikan	Ket.
									8	9		
	2 Lemari Arap				1	Buah	450.000	450.000	√		Selida	APBD II
	3 Kursi + Meja Tamu			2002	1	Buah	2.500.000	2.500.000	√		Selida	APBD II
	4 Cermin				1	Buah	225.000	225.000	√		Selida	APBD II
	5 Komputer			2001	1	Set	7.400.000	7.400.000	√		Selida	APBD II
	6 Meja Pimpinan			1989	1	Buah	1.350.000	1.350.000	√		Selida	APBD II
	7 Kursi Pimpinan			1989	1	Buah	800.000	800.000	√		Selida	APBD II
	8 Meja Keubeg			1989	4	Buah		1.000.000	√		Selida	APBD II
	9 Meja Keubeg			1989	1	Buah	450.000	450.000	√		Selida	APBD II
	10 Meja Tula Sifir			2001	2	Buah	607.500	1.215.000	√		Selida	APBD II
	11 Kursi Putar Pakai Lengan			1998	2	Buah	250.000	500.000	√		Selida	APBD II
	12 Kursi Sifir (Merah)			2002	6	Buah	205.000	1.230.000	√		Selida	APBD II
	13 Telepon			2002	1	Buah	225.000	225.000	√		Selida	APBD II
	14 Meja Komputer			2001	1	Paket	185.000	185.000				APBD II
	Jumlah Alet Kantor Dan Rumah Tengah							18.630.000				
1 3	Alet Studio dan Alet Komunikasi											
1 4	Alet-Alet Kedokteran											
1 5	Alet Laboratorium											
1 6	Buku Perpustakaan											
1 7	Barang Bercorak Kebudayaan											
1 8	Hewan dan Ternak Serta Tanaman											
1 9	Alat-alat Peralanjaan/Kemamanan											
	Persediaan											
2 0	Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis											

(Sumber : Sub. Bag. Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2005)

DIPTAK PROYEK DI LAM PENGERJUAN
SEKDA KABUPATEN MAROS
TAHUN 2005

			ANGGARAN	REALISASI	%
2	2.0	0400.3.6.03.04.1			
		Pembangunan Kantor Camat Maroangloe			
5	2.0	0400.3.6.03.16.1	Rp 187.500.000	Rp 37.500.000	20
7	2.0	0400.3.6.03.01.1	Rp 58.000.000	Rp 23.000.000	40
		Pembangunan Kantor Camat Lau + Blaya, emeliharaan I.A 2004	Rp 859.000.000	Rp 157.890.000	12
9	2.0	0400.3.6.03.40.1	Rp 73.750.000	Rp 33.760.000	46
		Pembangunan Kantor Lurah Peludaae	Rp 103.000.000	Rp 69.000.000	58
12	2.0	0400.3.6.03.18.1	Rp 54.625.000	Rp 35.625.000	54
13	2.0	0400.3.6.03.25.1	Rp 30.000.000	Rp 20.000.000	57
14	2.0	0400.3.6.03.39.1	Rp 99.710.000	Rp 67.500.000	58
		Pembangunan Kantor Desa Majanang	Rp 25.000.000	Rp 18.750.000	75
15	2.0	0400.3.6.03.17.1	Rp 28.900.000	Rp 21.675.000	75
17	2.0	0400.3.6.03.13.1	Rp 115.000.000	Rp 86.250.000	75
18	2.0	0400.3.6.03.26.1	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	75
19	2.0	0400.3.6.03.35.1	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	75
20	2.0	0400.3.6.03.37.1	Rp 39.900.000	Rp 30.000.000	75
21	2.0	0400.3.6.03.12.1	Rp 72.400.000	Rp 54.375.000	75
22	2.0	0400.3.6.03.14.1	Rp 49.900.000	Rp 37.500.000	75
23	2.0	0400.3.6.03.02.1	Rp 49.900.000	Rp 37.500.000	75
24	2.0	0400.3.6.03.05.1	Rp 49.900.000	Rp 37.500.000	75
25	2.0	0400.3.6.03.35.1	Rp 47.400.000	Rp 35.625.000	75
26	2.0	0400.3.6.03.07.1	Rp 47.400.000	Rp 35.625.000	75
27	2.0	0400.3.6.03.09.1	Rp 47.400.000	Rp 35.625.000	75
28	2.0	0400.3.6.03.22.1	Rp 47.400.000	Rp 35.625.000	75
29	2.0	0400.3.6.03.28.1	Rp 47.400.000	Rp 35.625.000	75
30	2.0	0400.3.6.03.31.1	Rp 47.400.000	Rp 35.625.000	75
31	2.0	0400.3.6.03.32.1	Rp 37.900.000	Rp 26.500.000	75
32	2.0	0400.3.6.03.11.1	Rp 29.900.000	Rp 22.500.000	75
33	2.0	0400.3.6.03.20.1	Rp 89.000.000	Rp 67.500.000	77
34	2.0	0400.3.6.03.10.1	Rp 77.300.000	Rp 64.725.000	84
36	2.0	0400.3.6.03.24.1	Rp 61.800.000	Rp 58.710.000	95
40	2.0	0400.3.6.03.38.1	Rp 5.100.000	Rp 4.960.000	97
41	2.0	0400.3.6.03.33.1			
		Sub. Lain			

(Sumber : State Bank Anggaran Sekda Kab. Maros tahun 2005)

4.3 Pengklasifikasian, Pengukuran dan Pencatatan Aset Tetap pada Sekretariat Daerah Pemda Kab. Maros menurut PSAP No. 07

Pada prinsipnya, Kepmendagri No 29 tahun 2002 dengan PP Nomor tahun 2005 adalah sama. Perbedaan nampak hanya pada pengklasifikasian akun serta format pertanggungjawaban pemerintah.

Mengacu pada contoh kasus pada Sekretariat Daerah Pemda Kab. Maros,

pengklasifikasian akun aktiva tetap dapat meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Sehingga, untuk mencatat saldo awal aset tetap yang dikuasai Sekretariat Daerah Pemda Kab. Maros pada tahun 2006, adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
	Tanah	11.340.903.000	11.340.903.000
	Dinvestasikan dlm Aset tetap Gedung dan Bangunan	3.309.184.000	3.309.184.000
	Dinvestasikan dlm Aset Tetap Peralata dan Mesin	1.971.398.405	1.971.398.405
	Dinvestasikan dlm Aset Tetap Konstruksi dlm Pengerjaan	1.434.410.000	1.434.410.000
	Dinvestasikan dlm Aset Tetap		1.434.410.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka ada beberapa hal yang dapat

dijadikan kesimpulan, yaitu :

1. Pada dasarnya, PP Nomor 24 tahun 2005 belum diterapkan pada Pemda Kab.

Maros.

2. Sistem Akuntansi Pemerintahan, terkhusus pada perlakuan akuntansi aset tetap,

pada Pemda Kab. Maros masih mengacu pada Kepmendagri Nomor 29 tahun

2002. Tetapi upaya-upaya dalam rangka penerapan PP Nomor 24 tahun 2005

sudah dimulai.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan

adalah :

1. Agar pemerintah lebih Pro aktif lagi mengadakan pelatihan-pelatihan teknis

penerapan PP Nomor 24 tahun 2005, dalam rangka penciptaan tertib

pembukuan guna terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih

transparan dan bertanggung jawab.

2. Pada Institusi Perguruan Tinggi, sebagai penyedia tenaga terdidik, Seyogyanya

Akuntansi Sektor Publik diperlakukan sama dengan Akuntansi Sektor Swasta

dengan cara menjadikan Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik di bagi dalam

beberapa mata kuliah berjenjang dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Ienteng Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Buletin Teknis *Penyusunan Neraca Awal Pemerintahan Daerah*. (Online). (www.ksap.org, diakses 25 Agustus 2006)
- Bastian Indra dan Gatot Supriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Konsep untuk Pemerintahan Daerah)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Firdaus, A.D. 2005, *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ihyaul Uium, MD. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press, Malang.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2005, *Sambutan dalam Acara Sosialisasi SAF*. Jakarta.
- Mahsun, M, Firma ,S, dan Heribertus. A. P. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFYogyakarta, Yogyakarta.
- Kepmendagri No. 29 tahun 2002. *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD*. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. 2006. *Citra Umbara*, Bandung.
- Soemarso, S.R. 1999, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Zaki Baridwan. 2004. *Intermediate Accounting*. BPFY Yogyakarta, Yogyakarta.

Kode Rekening :
 Uratan :

Perkiraan : Rp.
 Perubahan : Rp.
 Seterah Perubahan : Rp.

Tanggal dan Nomor PERDA
 Perubahan dan Tanggal &
 Nomor Pengesahan

Pengeluaran menurut surat perintah membayar uang (beban tetap) dan daftar pembukuan administratif. (Karena penambahan)

Uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP*)

Tgl. Dan Nomor urut buku Kas dari pada Penukaran SPMU

Dikurangi dari perhitungan


Keterangan

NO. SPMU atau daftar pembukuan	Tang-gal	Nama yang berhak / No. Rekening	Uraian	Jumlah	No. Urut dalam register B. II	Jumlah	Penun-jukan SPJ	Jumlah	Tang-gal	Nomor	A. Karena Kontra Pos			Jumlah	B. Menurut daftar pem-bayaran administratif (karena pengurangan)			Jumlah	
											Menurut potongan dalam SPMU	Tanggal	Nomor dim Kas		Menurut buku Kas	Tanggal	Nomor daftar		Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Pindahan Rp.																
			Jumlah Pindahan Rp.																
			Jumlah Pindahan Rp.																
			Jumlah Pindahan Rp.																

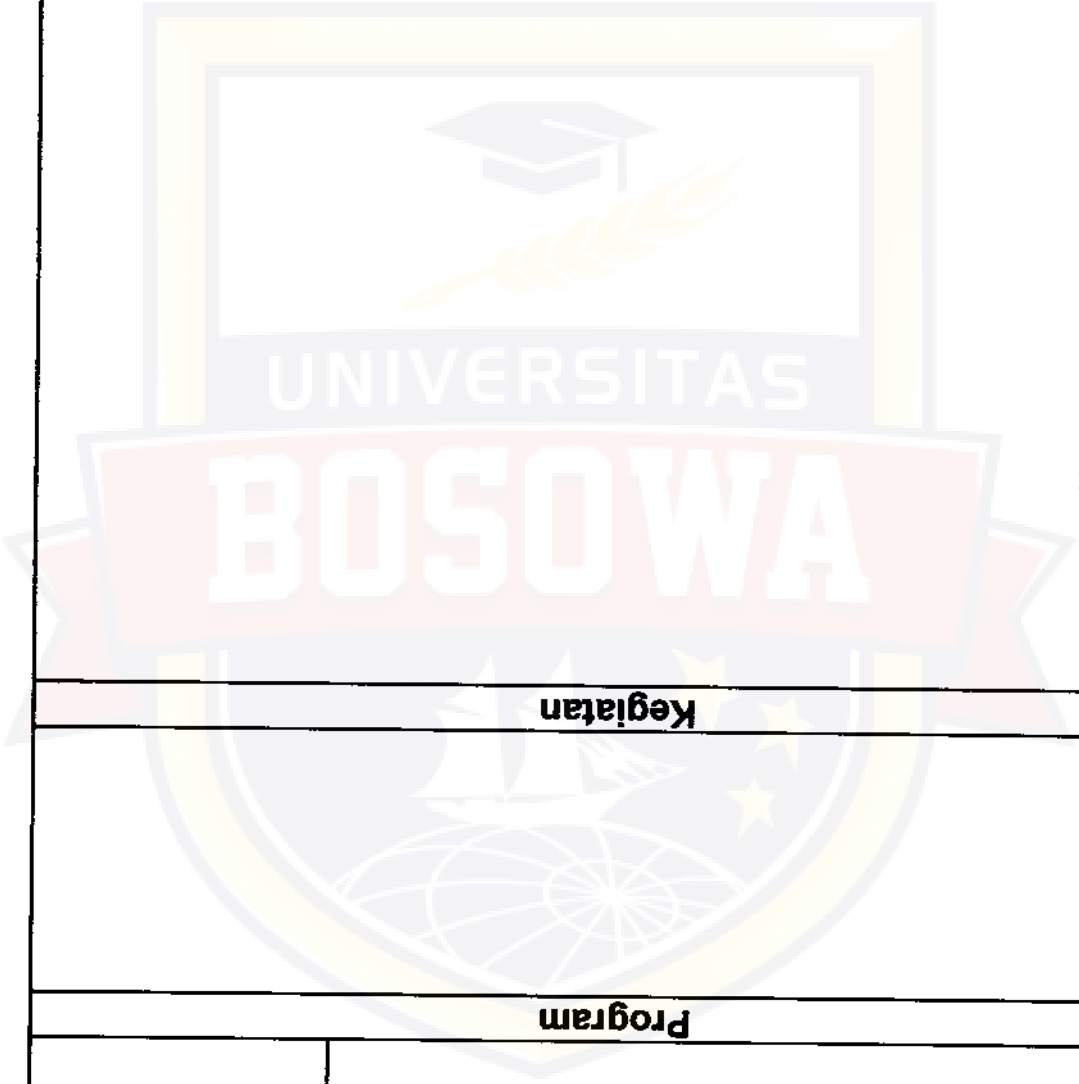
*) Jika pembekuan (UUD) dipergunakan, Maka kolom 6, 7, 8, dan 9 harus diisikan



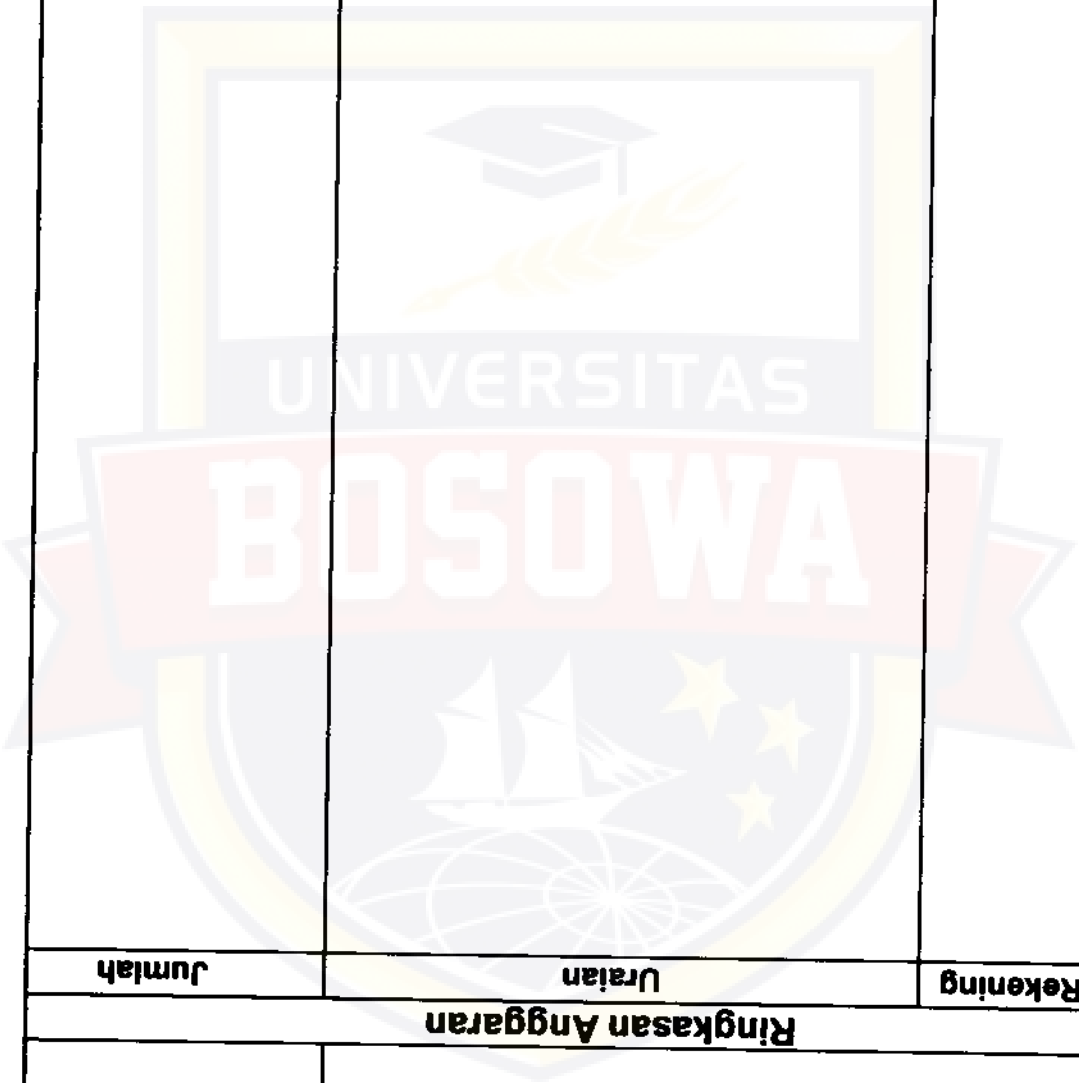
RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA	
Unit Kerja	
Tahun	
Bidang Kewenangan	
Visi	
Misi	
Tujuan	
Sasaran	
Tugas Pokok	
Fungsi	
Catatan	
Pimpinan	

Pimpinan		Catatan	
			
1. 2. 3. 4. Dst			
		Program	
		Unit Kerja	
Tahun		SATUAN KERJA	
S2		RENCANA ANGGARAN	

FORMAT FORMULIR S2A (Kegiatan Per Program) RASK

Catatan		Pimpinan	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. Dst 	
		Kegiatan	
		Program	
		Unit Kerja	Tahun
RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA	S 2 A		

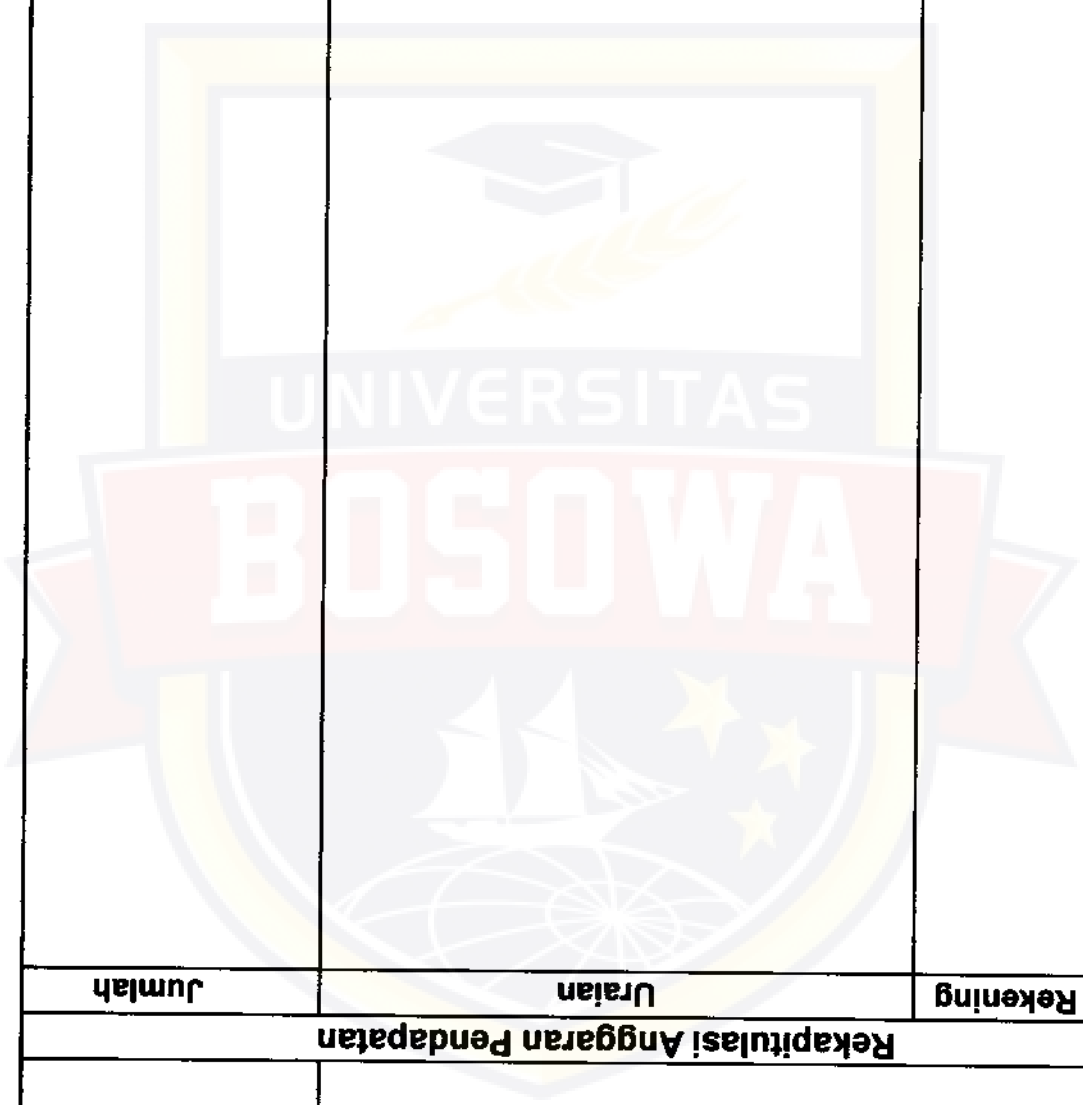
RENCANA ANGGARAN		SATUAN KERJA	
Unit Kerja			
Tahun			
Ringkasan Anggaran			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
Catatan		Pimpinan	



FORMAT FORMULIR S 3 A (Rekapitulasi Anggaran Pendapatan) RASK

Halaman :

RENCANA ANGGARAN		SATUAN KERJA	
S 3 A		Unit Kerja	
		Tahun	
Rekapitulasi Anggaran Pendapatan			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
Catatan		Pimpinan	



FORMAT FORMULIR S 3 A1 (Anggaran Pendapatan Per Kegiatan) RASK

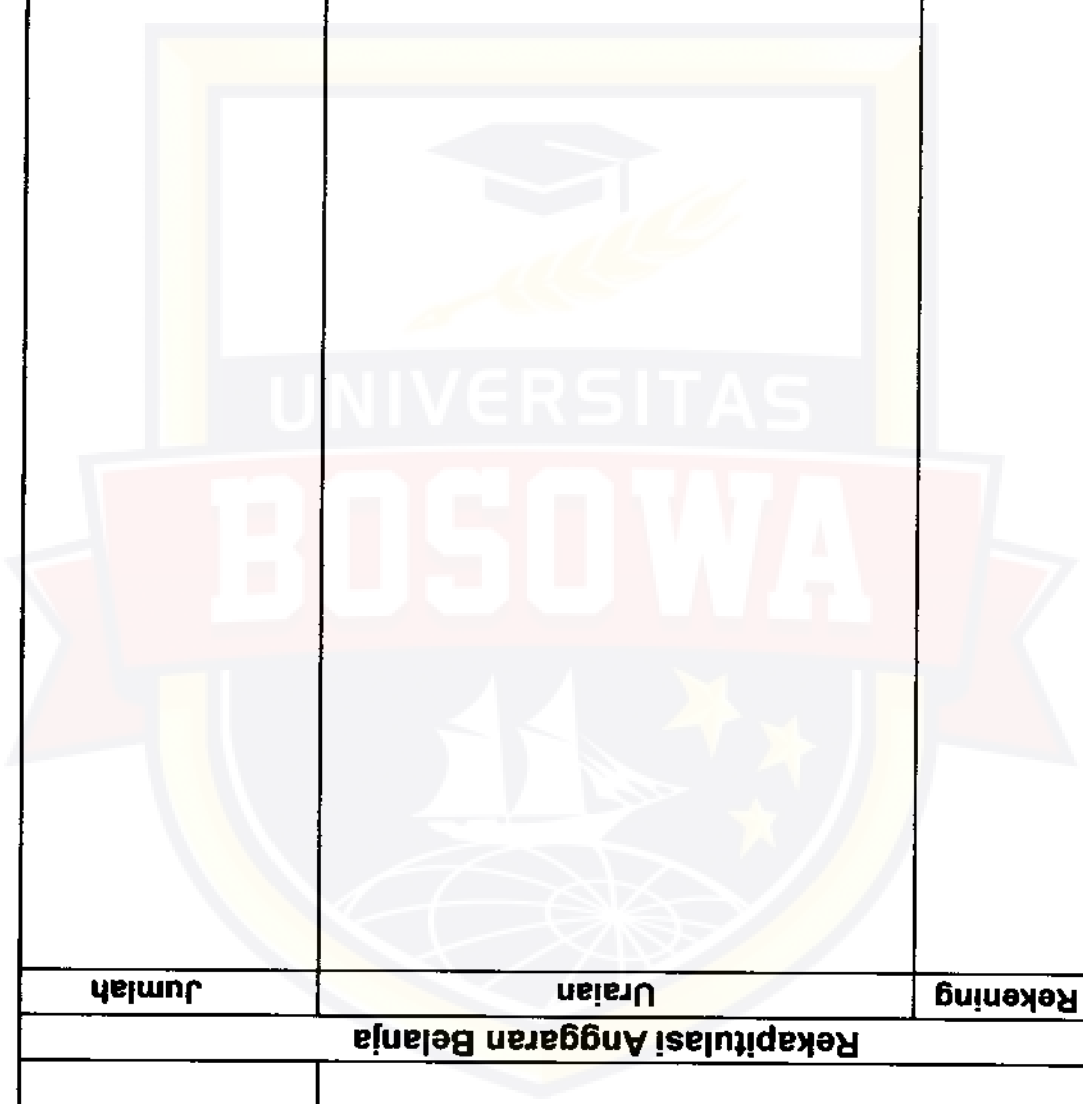
Halaman :

RENCANA ANGGARAN		S 3 A1	
SATUAN KERJA		Unit Kerja	
Kegiatan		Tahun	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Masukan			
Keluaran			
Hasil			
Manfaat			
Dampak			
Anggaran Pendapatan Per Kegiatan			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
Catatan		Pimpinan	

FORMAT FORMULIR S 3 B (Rekapitulasi Anggaran Belanja) RASK

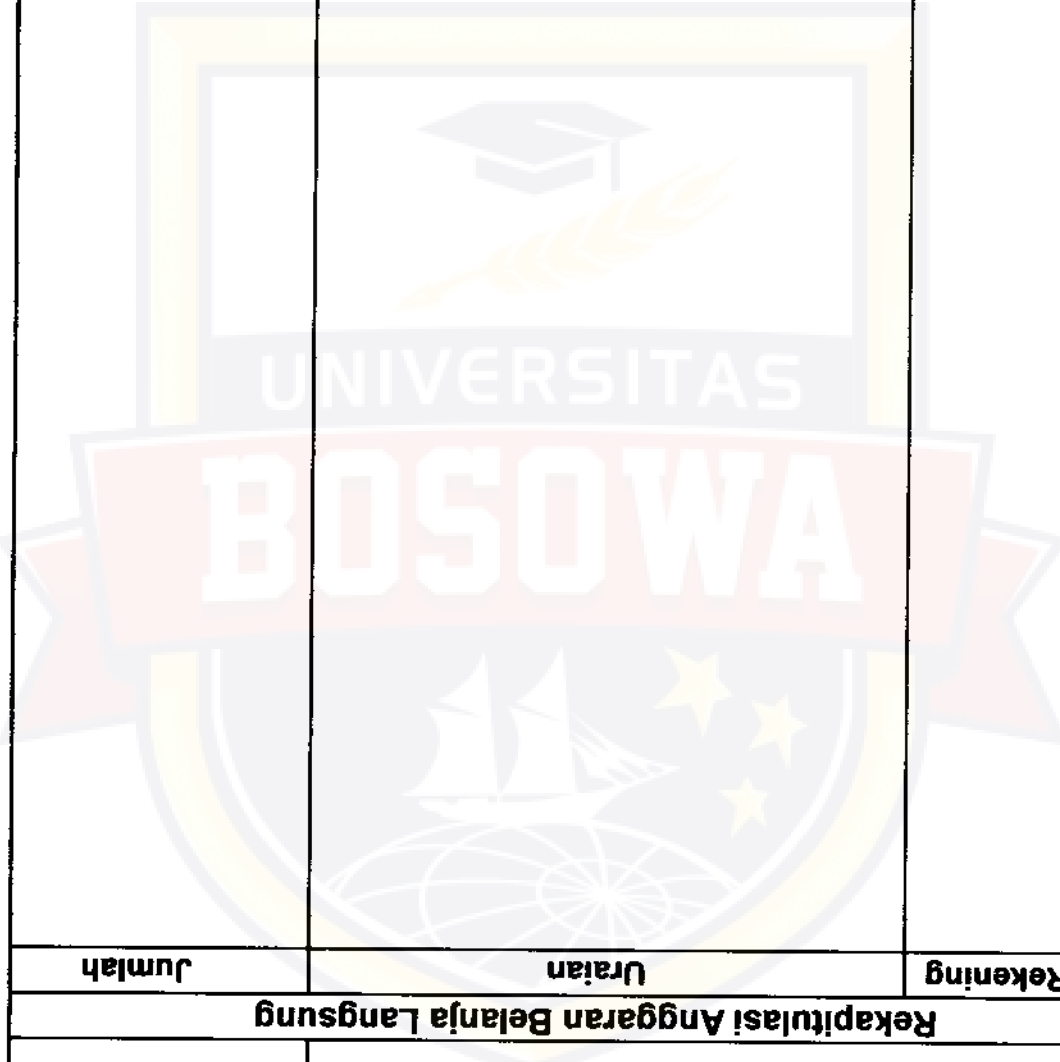
Halaman :

RENCANA ANGGARAN		SATUAN KERJA	
Unit Kerja		Tahun	
Rekapitulasi Anggaran Belanja			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
Catatan		Pimpinan	



FORMAT FORMULIR S 3 B (Rekapitulasi Anggaran Belanja) RASK

Halaman :

RENCANA ANGGARAN		SATUAN KERJA	
Unit Kerja		Tahun	
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
		Pimpinan	
		Catatan	

FORMAT FORMULIR S 3 B1.1 (Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan)

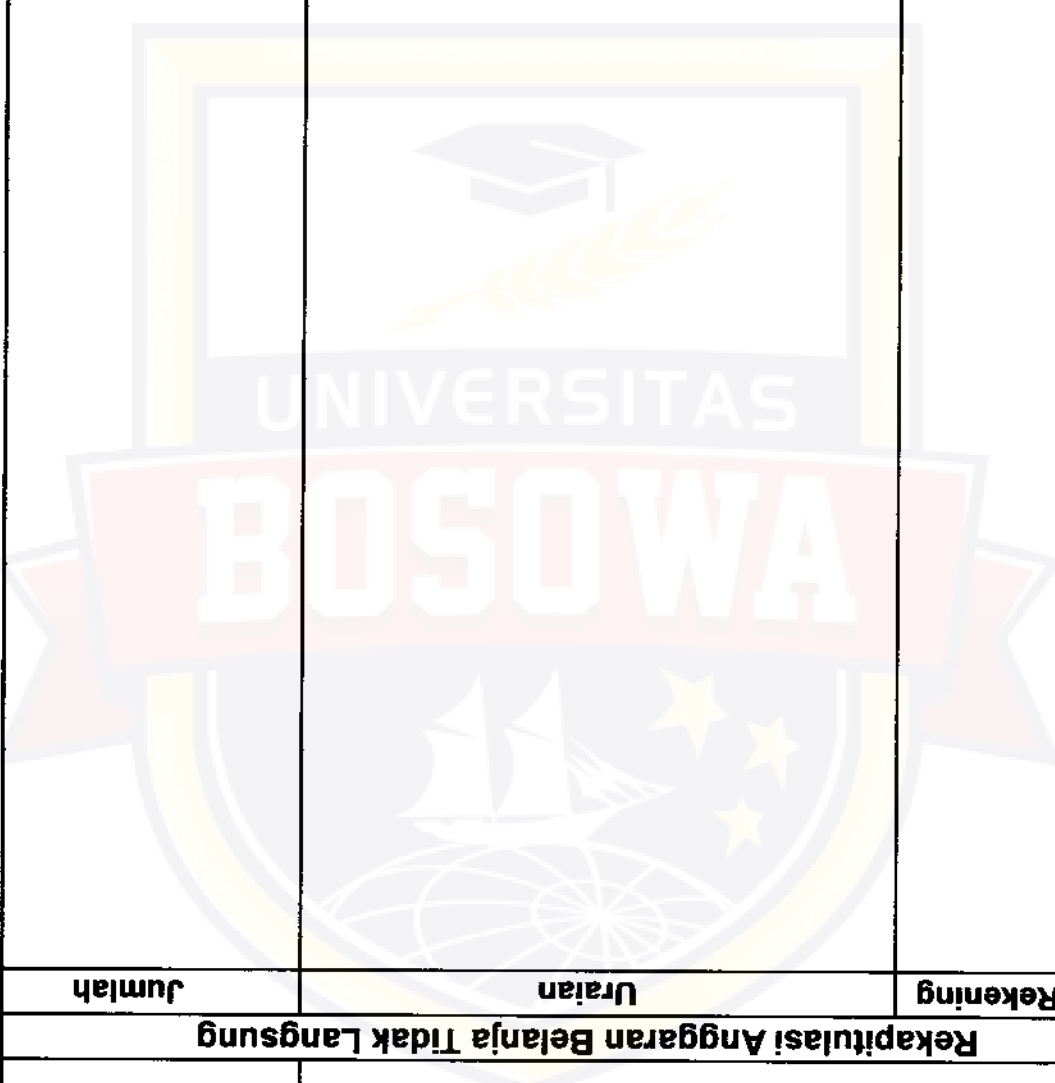
Halaman :

RENCANA ANGGARAN		SATUAN KERJA	
Unit Kerja		Tahun	
Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Masukan			
Keluaran			
Hasil			
Manfaat			
Dampak			
Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
Catatan		Pimpinan	

FORMAT FORMULIR S 3 B2 (Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung)

Halaman :

RENCANA ANGGARAN		SATUAN KERJA	
Unit Kerja		Tahun	
Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
Catatan		Pimpinan	



**FORMAT FORMULIR S 3 B2.1
(Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kegiatan)**

Halaman :

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA		Unit Kerja	
S 3 B2.1		Tahun	
Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kegiatan (Alokasi)			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
	Alokasi Belanja Pegawai / Personalia Per Kegiatan Non Investasi :		
	Jumlah 1		
	Alokasi Belanja Barang / Jasa Per Kegiatan Non Investasi :		
	Jumlah 2		
	Alokasi Belanja Pemeliharaan Per Kegiatan Non Investasi :		
	Jumlah 3		
	Alokasi Perjalanan Dinas Per Kegiatan Non Investasi :		
	Jumlah 4		
	JUMLAH 1 S.D. 4		
Catatan			
Pimpinan			

SURAI PERINTAH MEMBAYAR

Tahun Anggaran : 2006

Nomor SPW : 622-0

Pengisian Kas

BENDAHARA JUMAH DAERAH
Supaya membayar kepada :

Unit Kerja : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pesegang Kas/Rekening : **Sdr. ASMAWATI, S. Sdr**

Kecor Rekening & Bank : **10.002.8602**

Cabang : **BPD Maros**

MPWP :

Dasar Pembayaran (Otorisasi) : **819/SKOBOP/2006 27/09/2006**

Untuk Keperluan :

Pembayaran UTK-Biaya Honorarium Tim dan Honorarium Upan-Elemen Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan
Dana Mekanis Reklamasi (GPRD DM) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sesuai SPW Tersebut. ✓

Pembelanaan (Alokasi) pada kode rekening-objek belanja

2.01.0630.2.01.01.0014 Honorarium Tim/Panitia

Rp 7.500.000,00

2.01.0630.2.01.01.0021 Honorarium/keahlian

Rp 1.800.000,00

Potongan-potongan			
No	Uraian	Jumlah	
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah Potongan			
Informasi : Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPWU			
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1			
2			
Jumlah yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta		Rp 9.300.000,00	
Jumlah Potongan			
Jumlah yang dibayarkan			Rp 9.300.000,00
Sembilan Duta Tiga Ratus Sembilan Puluh			



Jumlah Yang Diminta Rp 9.300.000,00

SPW ini dibuat oleh fungsi akuntansi apabila telah disetujui dan disetujui oleh fungsi Perencanaan dan SDP

H. SWANSHI FADRY

Jenjang : Pembina TK I

KIT. 118 156 32

FUDJAN TAHR, SE

Pangkat : Eselata Muda TR I

KIT. 580 070 607